



fiskal

waspada antisipatif responsif



No ISSN: 2337-6309



2023, OPTIMIS & WASPADA

Menakar Dampak Tekanan Harga
Komoditas Global

Kebijakan Bea Keluar di Tahun
Berjaga-jaga

Risiko dan Tantangan Pemajakan
Ekonomi Digital di Indonesia



Edisi I/2023



Warta Fiskal dapat diunduh melalui website fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty, Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan, Adelia Surya Pratiwi

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara, Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



2023 : Optimis dan Waspada

Syahrir Ika¹

Mengelola ekonomi mirip dengan mengelola kehidupan. Dalam tekanan sebesar apapun, manusia harus optimis untuk tidak saja bisa bertahan hidup, tetapi juga bisa tumbuh dan sehat. Orang yang pesimis akan mengundang hadirnya penyakit dan bahkan bisa mempercepat

kematian. Optimis adalah sebuah pengharapan dan kepercayaan, bahwa tujuan yang direncanakannya akan berhasil pada kemudian hari. Demikian juga Bangsa. Bangsa yang optimis adalah bangsa yang hidup dengan penuh semangat untuk meraih tujuan atau cita-citanya. Bangsa yang penduduknya berpikir positif, memiliki

keinginan kuat untuk maju sehingga mereka harus melakukan refleksi terhadap apa yang sedang dialami, lalu melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih lemah, dan mempercepat kemajuan bagi hal-hal yang sudah baik, bahkan gesit mencari peluang-peluang baru dengan menciptakan cara hidup baru dan

¹Ketua Dewan Redaksi Warta Fiskal

produk baru melalui kerja-kerja kreatif dan inovatif. Bangsa yang optimis adalah bangsa yang penduduknya memiliki keinginan kuat untuk membuat kemajuan-kemajuan di segala bidang, meningkatkan daya saingnya terhadap bangsa-bangsa lain, dan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam segala tekanan eksternal, berapapun *magnitude*-nya. Bangsa yang optimis adalah bangsa yang penduduknya mau belajar bahkan belajar lebih giat. Apalagi di era teknologi dan informasi tinggi saat ini yang mendisrupsi banyak hal. *South Korea has become a developed country because of education. This is a consequence of economic growth from human resources which is accompanied by investment in research and development as well as utilization of digital system*, demikian ungkap Prof. Young-Hoon AHN, PhD, President of the Korea Local Government Municipal Police Institute. Korea Selatan adalah bangsa yang optimis, mereka beberapa tahun lalu tertinggal, tapi kini bisa masuk dalam jajaran negara maju. Mereka fokus di pengembangan *human capital* agar bisa menjadi *leader* pada ICT Global, dan saat ini mereka memimpin. Pemerintah melakukan investasi yang besar pada kualitas sumberdaya manusianya, karena mereka percaya bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki sumberdaya manusia yang kuat. Mereka percaya

bahwa tantangan-tantangan ke depan akan semakin besar dibandingkan kualitas manusianya, karena itu kualitas manusia harus dibuat lebih besar dari kualitas tantangan yang dihadapi. Di sini butuh investasi yang besar. Indonesia setidaknya memiliki pandangan yang sama dengan Korea Selatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada 2023 anggaran pendidikan di tanah air mencapai titik tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia, dimana dalam APBN 2023 mencapai Rp 612,2 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan yang lebih fleksibel dan inovatif lewat dana abadi untuk pendidikan. Dana abadi pendidikan kini telah mencapai lebih dari Rp 129 triliun. Uang itu untuk dapat memberikan dukungan pendidikan, penelitian, dan kebutuhan semua sektoral untuk meningkatkan kualitas indeks manusia (cnbcindonesia.com). Politik fiskal sudah dengan tepat meletakkan *pilar* dan *map* menuju bangsa yang maju. Paradigma yang dibangun adalah memotivasi penduduk untuk memperkuat kualitas pengetahuan dan ketrampilannya dan bersikap positif serta optimis akan masa depannya dan masa depan bangsanya. Hanya dengan paradigma ini, semua sumberdaya yang dimiliki dikelola bangsa Indonesia ini lebih produktif dan berdaya saing tinggi. *"Kemampuan bersaing bukan terletak pada menyesuaikan atau*

menyamakan kemampuan kita dengan tekanan eksternal, tetapi meningkatkan kemampuan kita di atas tekanan eksternal". Cara pandang ini yang membuat Indonesia bisa menjaga ekonominya berlayar dengan selamat di tengah Pandemi Covid-19. Paradigma ini juga yang membuat kita mampu menggayung laju ekonomi lebih cepat dari perkiraan kita dan juga perkiraan bangsa lain di dunia. Kejutan-kejutan ini bukan muncul karena nasib tetapi karena kita memilih jalan yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Kita paham bahwa *"waspada itu penting, tetapi optimis jauh lebih penting"*. Demikian Editorial. Silahkan membaca.



DAFTAR ISI

FOKUS

- 6** Ekonomi Tumbuh Kuat di Tengah Perlambatan Global
- 9** Menakar Dampak Tekanan Harga Komoditas Global
- 12** Pertumbuhan Ekonomi Menguat, Pembangunan Semakin Merata
- 15** Kebijakan Bea Keluar di Tahun Berjaga-Jaga
- 18** Risiko dan Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital di Indonesia

WAWANCARA

- 24** Pengelolaan Fiskal yang Sinkron dan Berkelanjutan untuk Kini, Esok, dan Nanti

ANALISIS

- 28** Menimbang Rencana Penerapan Cukai Plastik
- 31** Mengurai Kebijakan Utang Pemerintah
- 35** Menilik Pola Penerimaan PPN dari Aktivitas Ekspor-Impor & Pola Konsumsi Rumah Tangga
- 39** PSO Tepat Sasaran atau PSO Transportasi? Belajar dari KRL Jabodetabek

FISKAL INTERNASIONAL

- 43** Kebijakan Moneter Amerika Serikat (AS)

50 INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN

56 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Ekonomi Tumbuh Kuat di Tengah Perlambatan Global

Johan Zulkarnain Kasim² & Yogi Kristanto³

"Don't judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again"

(Nelson Mandela)

Begitu kutipan perkataan tokoh dunia, Nelson Mandela, untuk menggambarkan betapa pentingnya ketangguhan dan resiliensi dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Rasanya tidak berlebihan juga kalau kita mengatakan bahwa kutipan ini telah dibuktikan oleh ketangguhan perekonomian negeri ini. Dalam beberapa abad terakhir, perekonomian

Indonesia telah dihadapkan oleh berbagai rintangan berat. Tidak terlepas tantangan besar selama tiga tahun belakangan yaitu pandemi COVID-19, seperti halnya perekonomian mayoritas negara di dunia. Namun sekali lagi, Indonesia berhasil keluar dari krisis dan melakukan *epic comeback* di tahun 2022.

Kinerja perekonomian Indonesia Tahun 2022 tumbuh sangat kuat sebesar 5,3 persen atau 7,0 persen di atas level PDB di tahun 2019. Mengapa hal ini kemudian disebut sebagai pencapaian luar biasa? utamanya karena laju pertumbuhan ini terjadi juga di tengah

perekonomian global yang sedang berada dalam tren perlambatan. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi salah satu negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan yang solid namun dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Sebagai perbandingan, tingkat pertumbuhan ekonomi dan rata-rata inflasi Indonesia di tahun 2022 masing-masing sebesar 5,3 dan 4,2 persen. Sementara Amerika Serikat hanya mampu tumbuh 2,1 persen dengan tingkat rata-rata inflasi sebesar 8 persen. Pencapaian makroekonomi nasional ini merupakan modal penting untuk menjaga

^{2,3}Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

kesinambungan pertumbuhan ke depan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi di tahun 2023.

Laju pemulihan ekonomi yang kuat ini juga tidak terlepas dari efektivitas dan fleksibilitas pemerintah baik terkait pandemi maupun dalam menghadapi tantangan lainnya. Program vaksinasi dikejar demi mendorong percepatan terbentuknya imunitas masyarakat. Hasilnya pun sangat positif. Masyarakat akhirnya dapat merayakan kembali hingar bingar tradisi mudik di masa lebaran tanpa adanya lonjakan kasus COVID-19 di periode tersebut. Penyebaran kasus harian COVID-19 pun jauh lebih terkendali pasca masa puncak varian Omicron di awal tahun.

Namun tantangan manajemen fiskal tidak hanya berhenti dalam penanganan pandemi saja. Peran penting APBN juga kembali diuji dalam menghadapi gejolak ekonomi global lainnya, khususnya lonjakan tingkat inflasi global akibat konflik Ukraina-Rusia di awal tahun dan penerapan pengetatan kebijakan moneter dunia yang agresif. Pemerintah kembali melakukan *refocusing* dan realokasi APBN untuk mengoptimalkan kembali fungsi APBN sebagai *shock absorber* dari tekanan inflasi dunia yang melonjak tajam. Dukungan fiskal diberikan dalam meredam tekanan harga dalam jangka pendek melalui program BLT Minyak Goreng, penambahan

anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan intervensi-intervensi kritikal untuk menjaga stabilitas daya beli di seluruh kawasan nasional.

Di sisi lain, komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA juga berandil besar dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi di 2022. Sejak awal tahun 2020, pemerintah secara bertahap mendorong proses pengolahan sumber daya alam strategis nasional, khususnya produk olahan mineral. Perkembangan produk turunan olahan mineral seperti besi dan baja (HS 72), menjadi salah satu penopang utama neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama 32 bulan berurut-turut sejak Mei 2020. Pada tahun 2022 kinerja ekspor besi dan baja meningkat 27,82 miliar USD tumbuh 32,9 persen. Dalam lima tahun terakhir ekspor baja Indonesia tumbuh 397 persen dan kapasitas produksi baja meningkat hampir dua kali lipat. Menurut laporan perkembangan pasar baja, OECD 2022, diproyeksikan dalam waktu mendatang Indonesia dan beberapa negara asia tenggara lainnya seperti Malaysia dan Vietnam akan terus meningkatkan kapasitas industri bajanya serta menjadi

salah satu produsen dan eksportir baja utama. Tren positif komoditas ekspor non migas memberikan surplus neraca perdagangan Indonesia yang juga mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan total surplus sepanjang tahun 2022 sebesar US\$54,5 miliar.

Terdapat beberapa kondisi yang kemudian menjadi penyokong ekspansi aktivitas perekonomian di sepanjang tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, dengan *share* 51,9 persen, tumbuh 4,9 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 (2,0 persen). Tingkat inflasi yang relatif moderat dan terkendali serta pemulihan pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi rumah tangga di sepanjang 2022. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di tengah dinamika global juga turut memberikan andil dalam memberikan bantalan bagi daya beli di kelompok masyarakat tersebut. Tingkat kemiskinan nasional pun kembali turun dari 9,7 persen (September 2021) menjadi 9,6 persen (September 2022).

Dari sisi produksi, pemulihan ekonomi merata di semua sektor (*broad-based*) tumbuh positif. Sektor primer dengan *share* 24,6 persen terhadap PDB (pertanian dan pertambangan) tumbuh cukup resilien masing-masing

sebesar 2,3 persen dan 4,4 persen yoy, didukung oleh peningkatan permintaan ekspor komoditas unggulan dan pemenuhan kebutuhan kegiatan hilirisasi dalam negeri. Sektor manufaktur dan perdagangan dengan *share* 31,2 persen terhadap PDB masing-masing tumbuh 4,9 persen dan 5,5 persen yoy, penguatan tersebut seiring meningkatnya permintaan hasil olahan manufaktur seperti besi baja, mesin, dan alat elektronik dari pasar global. Sektor akomodasi dan makanan minuman serta transportasi tumbuh tinggi 12,0 persen yoy, bahkan melebihi level pra-pandemi, seiring dengan relaksasi kebijakan PPKM, peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.

Namun, perekonomian nasional tahun 2022 juga bukan tanpa melewati tantangan. Investasi sebagai kontributor terbesar kedua PDB dari sisi pengeluaran (*share* 29,1 persen) tumbuh relatif moderat 3,9 persen (yoy) secara tahunan. Investasi di sektor bangunan sepertinya belum menjadi prioritas utama baik bagi rumah tangga maupun pengusaha di tengah peningkatan harga input terkait sektor ini. Namun demikian, investasi pada jenis barang yang lebih produktif tumbuh signifikan. Investasi mesin dan kendaraan yang masing-masing tumbuh 22,4 persen dan 10,3 persen (yoy) secara tahunan. Kondisi ini

juga mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi sedang berlangsung di dalam negeri, termasuk dari tingginya minat untuk melanjutkan hilirisasi lanjutan ke produk-produk yang bernilai tambah lebih tinggi.

Laju pemulihan ekonomi yang kuat di tahun 2022 ini, menjadi landasan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek, sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang. Meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional masih berpeluang untuk tumbuh mencapai 5,0 – 5,3 persen di 2023. Secara domestik, dampak langsung risiko perlambatan ekonomi global ke domestik diperkirakan terbatas. Permintaan domestik yang kuat dikombinasikan dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif diharapkan dapat menjaga resiliensi perekonomian Indonesia dalam jangka waktu pendek. Selain itu juga kita bisa melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan dari kondisi global terkini. Relaksasi pembatasan sosial di Tiongkok memberikan *spillover effect* positif ke negara mitra dagang dan negara tujuan wisata, seperti halnya Indonesia.

Namun demikian, kita tetap tidak boleh lengah terhadap risiko ke depan. Meskipun diperkirakan akan lebih lunak dibanding

ekspektasi sebelumnya, namun risiko perlambatan ekonomi dunia masih akan tetap menghantui negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sejumlah negara di kawasan Eropa. Tekanan inflasi yang tinggi dan kemudian diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang agresif juga menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas sektor keuangan dunia, tidak terlepas negara negara *emerging* termasuk Indonesia. Ketidakpastian perubahan arah geopolitik juga dapat berdampak pada peta perdagangan internasional di masa yang akan datang. Strategi politik internasional yang tepat akan dapat menentukan masa depan ekonomi nasional di masa depan.

Kembali ke kutipan Nelson Mandela di awal, sepertinya perekonomian Indonesia harus menunjukkan lagi resiliensinya dalam menghadapi ujian yang lebih menantang di tahun 2023. Derasnya ombak global di 2023 diharapkan dapat diredam dan diatasi oleh fundamental yang kuat dan pemanfaatan potensi ekonomi yang sangat besar. Seperti layaknya video-video viral di TikTok: Permintaan domestik yang kuat: *check*; perbaikan sektor eksternal: *check*; reformasi berkelanjutan: *check*; APBN yang sehat: *check*. Namun ingat, kita tetap harus mawas diri. Tahun 2023 harus tetap dilihat sebagaimana jargon APBN 2023: optimis namun waspada.



Menakar Dampak Tekanan Harga Komoditas Global

Dedy Sunaryo⁴ & Raditiyo Harya Pamungkas⁵

Dinamika Harga Komoditas International

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global telah menghadapi berbagai tantangan. Pandemi Covid-19 yang telah melanda sejak 2020 menyebabkan ekonomi global berkontraksi dalam hingga mencapai 3% di tahun yang sama. Selain itu, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan semakin meningkatkan ketidakpastian. Hal tersebut tentunya berdampak pada terjadinya disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas melonjak tinggi di tengah

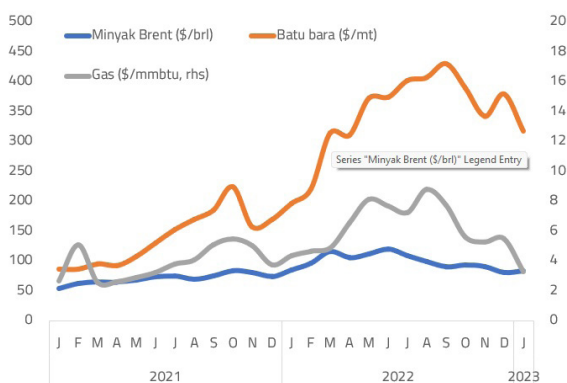
proses pemulihan ekonomi global. Hal tersebut juga dikhawatirkan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya krisis pangan dan energi. Kenaikan harga komoditas yang persisten tentunya akan mendorong kenaikan inflasi dan berdampak pada naiknya suku bunga secara global serta memperketat likuiditas di pasar keuangan.

Perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada akhir bulan Februari 2022 berdampak terhadap peningkatan harga komoditas, terutama komoditas energi seperti minyak bumi, gas dan batu bara, yang meningkat secara signifikan. Harga

minyak mentah dunia naik mencapai lebih dari 20% dalam kurun satu bulan dan terus berada pada level yang tinggi hingga mencapai titik puncak US\$120,1/barel pada Juni 2022. Kenaikan yang signifikan juga serupa terjadi pada komoditas batu bara dan gas yang mengalami peningkatan masing-masing mencapai kisaran 43% dan 89%. Namun, seiring dengan bayang-bayang resesi yang diperkirakan terjadi pada 2023, harga komoditas mulai bergerak melandai dan berada dalam tren menurun. Meskipun begitu, harga komoditas batu bara masih berada dalam tren yang tinggi,

³Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Grafik 1. Perkembangan Harga Komoditas Energi



Sumber : World Bank

di atas harga sebelum konflik geopolitik Rusia-Ukraina memanas.

Selain komoditas energi, harga komoditas pangan juga melonjak sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina di tengah tantangan perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa negara. Harga kedelai, jagung, dan gandum, *crude palm oil* (CPO) meningkat hingga mencapai 10-25% dalam satu bulan. Serupa dengan harga komoditas energi, hingga Februari, terdapat kecenderungan harga mulai melandai meskipun tetap perlu diwaspadai karena risiko cuaca ekstrem di beberapa negara sentra produsen.

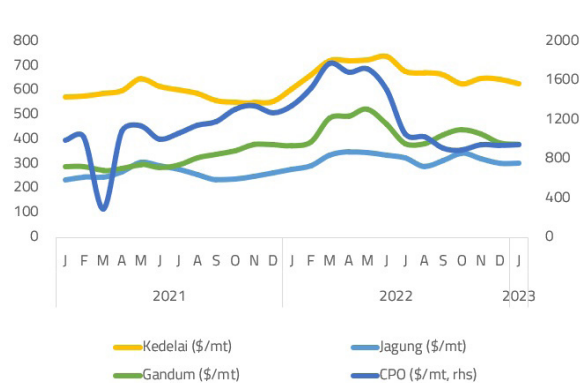
Transmisi ke Harga Domestik

Fenomena kenaikan harga pada berbagai komoditas global, terutama energi dan pangan tentunya menjadi perhatian karena akan memberikan dampak pada perekonomian domestik,

terutama pergerakan harga domestik. Hal ini dapat mendorong terjadinya kenaikan inflasi yang bersumber dari *imported inflation*. Di tengah proses pemulihan ekonomi nasional, stabilitas harga domestik menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat yang tengah bergerak positif. Risiko kenaikan harga global dapat tertransmisi pada naiknya harga komoditas domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tekanan pada harga komoditas global tentunya juga telah berdampak pada pergerakan harga komoditas domestik sehingga laju inflasi sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi pada beberapa komoditas pangan dan energi, terutama yang sebagian besar masih berbahan baku impor. Kenaikan tajam pada harga minyak mentah dunia telah mendorong kenaikan harga BBM dan gas nonsubsidi.

Grafik 2. Perkembangan Harga Komoditas Energi



Peningkatan juga terjadi pada tarif angkutan udara yang dipengaruhi oleh kenaikan bahan bakar avtur. Peningkatan secara umum harga komoditas global juga tercermin pada pergerakan inflasi komponen inti.

Sepanjang Januari – Agustus 2022, harga BBM dan LPG subsidi domestik masih relatif terkendali didukung oleh kebijakan untuk mempertahankan harga, guna menjaga aktivitas ekonomi rumah tangga dan industri. Di sisi lain, komoditas energi nonsubsidi sudah mengalami peningkatan. Dengan terus bertahannya harga minyak mentah pada level yang tinggi, Pemerintah menempuh kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi, yaitu Peralite dan Solar Subsidi pada awal September 2022 guna meningkatkan kualitas belanja subsidi dan kompensasi energi serta ketepatan sasaran penerima. Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai pertimbangan yang sangat panjang, terutama dalam

merumuskan kebijakan dengan dampak distorsi pada ekonomi yang paling minimal karena kondisi ekonomi domestik yang masih dalam proses pemulihan.

Di sisi perkembangan harga pangan, beberapa komoditas mengalami tekanan, seperti kedelai, gandum, jagung, dan CPO. Naiknya harga CPO telah berdampak pada kenaikan harga minyak goreng ritel secara signifikan. Begitupun dengan kedelai dan gandum yang mendorong kenaikan harga tahu-tempe dan produk turunan gandum, seperti roti dan mie instan. Sementara, kenaikan harga jagung berdampak pada harga produk unggas melalui transmisi kenaikan harga pakan yang mendorong naiknya ongkos usaha ternak. Di tengah harga pangan yang masih menekan, komoditas pangan domestik juga mengalami tekanan akibat gangguan suplai karena faktor cuaca sehingga harga pangan pada pertengahan tahun mengalami peningkatan tajam.

Melihat kenaikan harga yang terus berlanjut, Pemerintah telah merespons cepat melalui langkah kebijakan pengendalian inflasi, termasuk dalam rangka stabilisasi harga pangan. Pemerintah telah melakukan kebijakan intervensi harga, pengawasan distribusi, subsidi, serta penguatan pasokan dan cadangan pangan. Dengan begitu, laju inflasi masih dapat bergerak secara moderat didorong oleh transmisi harga yang masih

terbatas, serta berbagai kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi secara nasional. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk meredam dampak rambatan ke komoditas domestik. Instrumen APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga terjaga, terutama daya beli bagi masyarakat miskin dan rentan.

Perkiraan Dinamika Harga ke Depan

Perkembangan ekonomi dunia masih diperkirakan melambat. Dalam publikasi IMF Januari 2023, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 akan mencapai 2,9% lebih rendah dari estimasi tahun 2022 yang mencapai 3,4%. Perkiraan dari World Bank bahkan lebih pesimis, hanya akan tumbuh sebesar 1,7%, jauh lebih rendah dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Perlambatan tersebut disebabkan oleh, antara lain masih tingginya tingkat suku bunga yang mendorong kenaikan *financing cost* dan dapat menyebabkan krisis utang. Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina yang masih belum mereda menambah ketidakpastian ekonomi ke depan. Kondisi tersebut dapat memperlemah permintaan dan mendorong turunnya harga komoditas di tahun 2023. Dalam publikasi yang sama, harga minyak diproyeksikan turun sekitar 16%, sementara harga komoditas nonenergi

diperkirakan turun rata-rata sebesar 6,3%.

Dengan melambatnya harga komoditas global tersebut, akan berdampak pada menurunnya tekanan global terhadap harga-harga domestik, terutama jika dibandingkan harga di tahun 2022. Mempertimbangkan tekanan global yang melambat, laju inflasi 2023 pun diperkirakan akan menurun secara *year-on-year* dan terus diarahkan agar mencapai kisaran sasaran inflasi, $3,0\% \pm 1,0\%$ hingga akhir tahun. Hal ini juga diperkuat dengan berbagai kebijakan pengendalian inflasi pangan agar harga pangan dapat bergerak stabil.

Meskipun begitu, transmisi harga tetap perlu diwaspadai, terutama komoditas pangan yang masih mengalami tekanan akibat cuaca ekstrem sehingga mengganggu produktivitas dan stok pangan secara global. Dalam situasi ini, APBN tetap berperan sebagai *shock absorber* sehingga dampak tekanan harga akan cenderung terbatas sehingga daya beli masyarakat domestik akan terus tetap terjaga. Terjaganya daya beli masyarakat tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan yang berkesinambungan, terutama di masa setelah pandemi.



Pertumbuhan Ekonomi Menguat, Pembangunan Semakin Merata

Mahpud Sujai⁶

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 lalu baru saja dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 lalu sebesar 5,31 persen year on year (yoy). Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang terjadi sejak tahun 2013. Angka pertumbuhan ekonomi ini tentu saja patut disambut dengan rasa gembira, dimana pertumbuhan ekonomi ini

dicapai ditengah kondisi ketidakpastian dan resesi ekonomi global yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Pertumbuhan ekonomi yang menguat tersebut terjadi dalam semua komponen, baik dari sisi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah maupun investasi atau Penanaman Modal Tetap

Domestik Bruto (PMTB). Dari sisi konsumsi rumah tangga, selama tahun 2022 tumbuh impresif sebesar 4,93 persen yoy. Stabilisasi konsumsi masyarakat tersebut didukung oleh efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid 19 dan tingkat inflasi yang terkendali. Konsumsi rumah tangga yang turun cukup tajam pada masa pandemi tahun 2020 sebesar negatif 2,63 persen, kemudian mengalami *rebound* menjadi positif 2,02 persen pada

⁶Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga telah kembali mencapai tingkat pertumbuhan seperti masa pra pandemi.

Sementara itu, dari sisi konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 4,51 persen pada tahun 2022. Konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh belanja negara yang sangat besar terutama terkait program pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasi dampak pandemi. APBN selama masa pandemi berfungsi sebagai *shock absorber* atau penyerap guncangan yang melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi. APBN pada tahun 2022 ditujukan untuk meredam gejolak harga komoditas dunia melalui berbagai program, antara lain program perlindungan sosial, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi hingga insentif untuk berbagai kegiatan ekonomi. Demikian halnya dari sisi investasi, PMTB terus meningkat hingga mencapai 3,87 persen pada tahun 2022. Tumbuhnya PMTB tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi lanjutan produk-produk sumber daya mineral.

Indikator Konsumsi

Dilihat dari berbagai indikator konsumsi, pertumbuhan konsumsi dalam PDB menunjukkan prospek pertumbuhan

jangka pendek yang masih kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan ekonomi masyarakat ke depan masih dalam tingkat yang cukup optimis. Sementara itu, indeks penjualan retail (*Retail Sales Index*) tetap bergerak stabil. Pergerakan ini didukung oleh pertumbuhan tertinggi pada kelompok suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang terus tumbuh kuat.

Perbaikan indikator konsumsi juga terjadi pada tingkat penjualan kendaraan bermotor.

Penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2022 secara volume terus tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh sehat. Indikator konsumsi lain yang tumbuh cukup baik adalah pertumbuhan kredit konsumsi. Kredit konsumsi yang terus meningkat menunjukkan bahwa indikator konsumsi masyarakat terus meningkat kuat karena kredit konsumsi secara langsung mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Indikator konsumsi lain yang meningkat adalah pertumbuhan konsumsi listrik. Konsumsi listrik selama tahun 2022 secara umum terus tumbuh terutama didorong oleh pertumbuhan yang tinggi

dari kelompok bisnis dan rumah tangga.

Perkembangan indikator konsumsi yang meningkat tersebut belum diikuti oleh sektor konstruksi dan real estat. Kinerja PMTB Bangunan sebagai *lead indicators* sektor konstruksi dan real estat terindikasi masih terbatas pada tahun 2022. Konsumsi semen domestik selama tahun 2022 masih belum mengalami peningkatan yang cukup baik. Konsumsi semen *sack* yang biasa digunakan dalam pembangunan properti perumahan masih berkontraksi. Namun demikian, penjualan semen *bulk* yang biasanya digunakan untuk konstruksi pembangunan infrastruktur mampu tumbuh secara positif. Produksi semen domestik sepanjang tahun 2022 mampu tumbuh positif dan diserap oleh pasar baik domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2022 didorong juga oleh peningkatan investasi. Dalam hal investasi langsung (*direct investment*), Indonesia memiliki potensi menjadi tujuan investasi. Realisasi investasi langsung pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang impresif terutama didukung kuat oleh sektor industri, khususnya industri logam dasar. Meningkatnya investasi langsung di sektor industri logam dasar terutama didorong oleh kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Investasi langsung pada tahun 2022 mencapai 1.207 triliun dimana investasi dalam

negeri mencapai 552 triliun dan investasi asing langsung mencapai 654 triliun. Dalam hal negara asal investasi asing, Singapura masih mendominasi dengan nilai investasi sebesar 10,5 triliun diikuti oleh Tiongkok sebesar 5,2 triliun, Hongkong 3,9 triliun, dan Jepang sebesar 2,8 triliun.

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi nasional agregat yang meningkat di tahun 2022 mencerminkan pula pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Semua daerah di Indonesia mampu bangkit dan tumbuh positif di tahun 2022 namun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Beberapa wilayah mampu tumbuh secara agresif di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Maluku dan Papua tumbuh cukup signifikan pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,7 persen jauh di atas pertumbuhan rata-rata nasional di tingkat 5,3 persen. Demikian juga dengan wilayah Sulawesi, mampu mencatatkan pertumbuhan yang sangat baik dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7 persen. Di sisi lain, perekonomian wilayah

Kalimantan hanya tumbuh 4,9 persen atau sedikit di bawah rata-rata nasional. Selain itu, wilayah Sumatera juga hanya mampu tumbuh sekitar 4,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis di wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi terutama didorong oleh kebijakan hilirisasi industri pertambangan yang cukup mendorong secara kuat ekonomi di kawasan timur Indonesia tersebut. Investasi di sektor pertambangan dan industri logam dasar yang meningkat ikut mendorong pertumbuhan di kawasan tersebut lebih cepat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih didorong oleh sektor tradisional berupa perkebunan, industri pengolahan, dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, perekonomian di pulau Jawa dapat tumbuh cukup tinggi terutama ditopang oleh sektor perdagangan dan industri serta informasi dan komunikasi, terutama di wilayah tiga besar utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Dalam hal *share* ekonomi wilayah terhadap perekonomian nasional, wilayah di Pulau Jawa masih memiliki *share* yang paling besar dan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. *Share* ekonomi Pulau Jawa mencapai 56,5 persen atau lebih dari separuh

dari besaran perekonomian nasional. *Share* ekonomi terbesar kedua adalah Pulau Sumatera dengan besaran ekonomi sebesar 22 persen dari ekonomi nasional diikuti oleh Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua dengan *share* ekonomi masing-masing sebesar 9,2 persen, 7 persen, 2,7 persen, dan 2,5 persen dari total perekonomian nasional.

Dilihat dari *share* perekonomian tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian nasional masih timpang dan belum merata terutama antara Pulau Jawa dan Luar Jawa atau antara Bagian Barat dan Bagian Timur Indonesia. Namun demikian, ketimpangan antar wilayah tersebut semakin berkurang terutama didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti pembangunan beberapa kawasan industri di luar pulau Jawa, kebijakan hilirisasi industri hingga rencana pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang adil dan merata dapat terwujud di seluruh wilayah nusantara.



Kebijakan Bea Keluar di Tahun Berjaga-Jaga

Eddy Mayor Putra Sitepu⁷

Pengantar

Masa pandemi COVID-19 telah berlalu setelah hampir 3 tahun lamanya seluruh dunia mengalami masa yang mencekam. Dengan penuh rasa syukur, Indonesia dapat melewati masa krisis yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Bahkan, pengalaman Indonesia mengatasi krisis multidimensi tersebut tergolong sukses dan menjadi perhatian dunia dengan tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi serta penanganan pandemi yang dinilai berhasil. Namun, dengan berlalunya pandemi, apakah masa tersulit telah terlewati?

Tahun 2023, Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang berbeda. Setahun menjelang pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak, APBN kembali pada disiplin konsolidasi fiskal yang sudah

dibangun, yaitu defisit di bawah 3 persen. Sementara itu, dinamika global terkait tersumbatnya rantai pasok yang diperparah dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta AS-Tiongkok turut menyumbang kerumitan dalam pengelolaan fiskal di tahun ini.

Secara khusus, kebijakan penerimaan negara mengalami tekanan dari berbagai aspek tersebut di atas. Salah satu elemen penerimaan negara yang krusial untuk diamati adalah penerimaan bea keluar. Sebagai komponen dari pajak perdagangan internasional, kontribusi bea keluar cukup signifikan. Penerimaan bea keluar di tahun 2021-2022 menunjukkan kinerja yang luar biasa, mencapai angka tertinggi setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Berdasarkan data sejak tahun 2000 hingga 2020, keranjang pajak perdagangan internasional

didominasi oleh penerimaan bea masuk. Namun kondisi tersebut berubah drastis di tahun 2021 ketika kenaikan tajam harga komoditas mendorong penerimaan bea keluar meningkat lebih dari 8 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lonjakan tajam penerimaan bea keluar tersebut terutama didorong oleh komoditas CPO dan turunannya dari Rp 1 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 29 triliun pada tahun 2021 (Gambar 1). Tren tersebut masih berlanjut di tahun 2022 berdasarkan data hingga bulan September.

Kinerja positif sektor perkebunan kelapa sawit serta produk turunannya tersebut tentu tidak terlepas dari tingginya harga *crude palm oil* (CPO) di pasar internasional serta faktor pendukung lainnya. Namun kelapa sawit hanyalah salah satu bagian dari cerita penerimaan bea keluar

⁷Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Indonesia. Produk mineral di samping produk kayu, kulit dan kakao mempunyai dinamika tersendiri yang akan turut memengaruhi realisasi penerimaan bea keluar di tahun ini. Pada bagian berikutnya, akan didiskusikan berbagai aspek yang akan menentukan arah kebijakan bea keluar Indonesia di

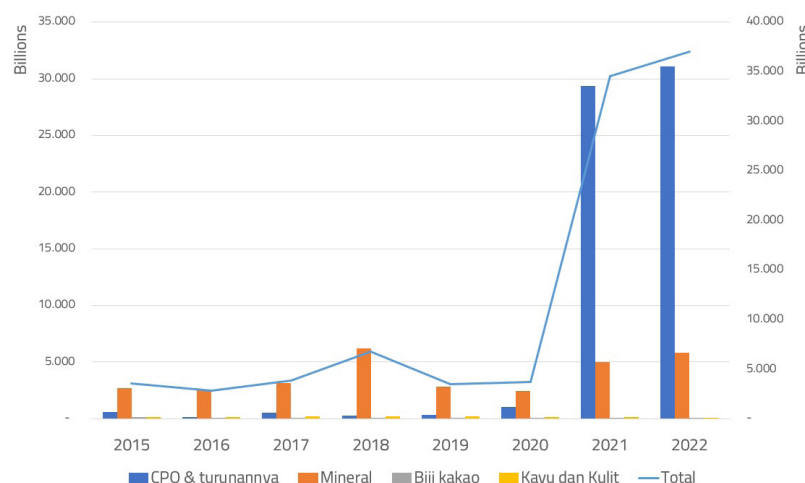
Domestik Bruto tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, namun juga menyumbang terhadap penerimaan negara dalam bentuk bea keluar. Tentu tidak semua barang ekspor dikenakan bea keluar. Masih mengacu pada UU 17/2006, tujuan pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor

terdapat 4 kelompok barang yang dikenakan bea keluar pada saat diekspor yaitu: (i) CPO dan turunannya; (ii) mineral; (iii) biji kakao; dan (iv) kayu dan kulit.

Peraturan pelaksanaan terkait penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar serta tarif bea keluar yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.010/2022 yang berlaku sejak 9 Agustus 2022. Untuk memastikan bahwa kebijakan bea keluar tetap berjalan sesuai tujuan sebagaimana diatur pada UU 17/2006 di atas, Pemerintah secara berkala meninjau kebijakan bea keluar dengan memperhatikan dinamika pasar internasional serta kepentingan para *stakeholders* terkait. PMK Nomor 123/PMK.010/2022 adalah perubahan kedua dari PMK Nomor 39/PMK.010/2022 yang berlaku pada 1 April 2022. Perubahan yang cepat terjadi dalam waktu yang relatif singkat menuntut respons kebijakan yang selaras dengan dinamika tersebut. Penambahan *layer* untuk pengenaan bea keluar atas komoditas CPO dan produk turunannya dari yang semula 12 menjadi 17 *layer* berdasarkan *range* harga dinilai efektif mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memastikan tercapainya tujuan melindungi kepentingan nasional.

Menghadapi tahun penuh kewaspadaan di 2023, Pemerintah mutlak

Gambar 1. Penerimaan Bea Keluar berdasarkan Komoditas 2015-2022*



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah *hingga September 2022

tahun 2023, tahun optimisme sekaligus masa berjaga-jaga.

Tantangan kebijakan bea keluar

Berdasarkan definisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (UU 17/2006) tentang Kepabeanan, bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Dalam hal ini, ekspor sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Produk

adalah untuk: (a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (b) melindungi kelestarian sumber daya alam; (c) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau (d) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Penting untuk dicatat bahwa pengenaan bea keluar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional. Hingga saat ini,

mempertimbangkan berbagai faktor terkait dalam merumuskan kebijakan bea keluar. Hal terpenting yang patut diwaspadai adalah fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat harga internasional merupakan basis penghitungan formula bea keluar. Secara khusus, di tahun 2023, fluktuasi harga komoditas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. Pertumbuhan ekonomi: Laju pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap permintaan komoditas akan menjadi faktor penting yang memengaruhi harga komoditas.
2. Peristiwa geopolitik: Ketegangan politik, konflik, dan sengketa perdagangan dapat mengganggu pasokan komoditas dan mendorong harga lebih tinggi.
3. Kebijakan perubahan iklim dan lingkungan: Peningkatan fokus pada keberlanjutan dan transisi ke energi bersih dapat berdampak pada permintaan komoditas tertentu, seperti bahan bakar fosil, dan memengaruhi harga.
4. Gangguan rantai pasokan: Gangguan pada produksi dan transportasi komoditas karena cuaca, pemogokan buruh, atau faktor lain dapat

memengaruhi pasokan dan mendorong harga lebih tinggi.

5. Faktor spesifik terkait komoditas: Harga komoditas tunduk pada dinamika penawaran dan permintaan tertentu, dan kondisi khusus untuk setiap komoditas dapat memengaruhi harga. Misalnya, perubahan produksi dan konsumsi komoditas pertanian, seperti biji-bijian dan ternak, dapat berdampak pada harga pangan.

Faktor lain yang berpotensi turut memengaruhi penerimaan bea keluar di tahun 2023 yaitu kebijakan hilirisasi produk mineral. Sesuai amanat pasal 102 dan 170A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengusaha pertambangan mineral tidak diizinkan untuk menjual produk mineral yang belum diolah atau dimurnikan setelah Juni 2023. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (*supply chain*) mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya mineral, dan kelanjutan operasi

pertambangan. Mengingat bea keluar merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk melindungi kepentingan nasional, maka bea keluar dapat menjadi salah satu alternatif alat kebijakan yang digunakan sebagai bagian dari bauran kebijakan dalam rangka menyukseskan penghentian ekspor mineral mentah tersebut di atas.

Penutup

Catatan kinerja positif penerimaan bea keluar di 2 tahun terakhir, meskipun menggembirakan, perlu ditinjau secara hati-hati. Pasalnya, capaian penerimaan bea keluar sangat tergantung pada dinamika harga komoditas internasional yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi di tingkat global. Kegagalan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan gejolak harga komoditas dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi APBN dan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk mengelola dampak volatilitas harga komoditas terhadap perekonomian secara lebih luas, termasuk melalui formulasi kebijakan bea keluar. Lebih jauh, peran strategis bea keluar sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan terjaganya kepentingan nasional memberi ruang untuk digunakan secara lebih luas, diantaranya untuk mendukung keberhasilan hilirisasi produk sumber daya mineral.



Risiko dan Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital di Indonesia

Melani Dewi Astuti⁸

Pengantar

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi dari semula konvensional menjadi digital. Indonesia, dengan populasi yang sangat besar, yaitu 275.361.267 jiwa per Juni 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) tentunya mempunyai skala internet ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, Bain & Company (2022), ekonomi digital Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai USD 77 miliar dan diperkirakan mampu

mencapai USD 220 – 360 miliar pada tahun 2030, dengan persentase tertinggi adalah *e-commerce*, disusul dengan transportasi dan pesan antar makanan.

Digitalisasi ekonomi secara umum, menimbulkan banyak tantangan bagi negara-negara di dunia, khususnya terkait pemajakan. Hal ini dikarenakan, pelaku usaha digital dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar dari suatu negara pasar tanpa harus hadir di negara pasar tersebut. Mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tentunya lebih sulit dibanding mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN).

Meskipun penyedia barang/jasa merupakan WPLN, untuk

PPN, pajak dikenakan oleh negara di mana konsumen berada berdasarkan asas destinasi konsumsi. Dengan demikian, mengenakan PPN akan lebih mudah karena yang menanggung pajak adalah konsumen dalam negeri yang merupakan WPDN. Tantangan utama terkait PPN adalah menentukan pihak yang akan memungut PPN, terutama jika konsumennya adalah individu.

Sementara itu, untuk PPh, tantangan pemajakannya lebih besar karena berdasarkan ketentuan saat ini, yaitu, Undang-Undang PPh dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), negara pasar hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari pelaku usaha digital luar negeri jika terdapat kehadiran fisik di

⁸Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

negara pasar. Kehadiran fisik tersebut dengan menciptakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara pasar, yang memperbolehkan negara pasar untuk mengenakan pajak atas laba Pelaku Usaha digital luar negeri. BUT untuk digital ekonomi dapat berupa: (1) tempat tetap seperti kantor, gudang, server; (2) agen penjualan yang sifatnya tidak independen; atau (3) BUT jasa, jika jasa dilakukan di negara pasar melebihi waktu tertentu.

Dengan adanya tantangan pemajakan ekonomi digital, negara-negara OECD dan G20 yang tergabung dalam *Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* bekerja sama dalam menciptakan suatu solusi pemajakan ekonomi digital, sehingga lahir *BEPS Project*. Proyek BEPS telah menghasilkan 15 aksi rekomendasi pada tahun 2015, di mana *BEPS Action 1* terkait ekonomi digital memberikan rekomendasi terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) melalui modifikasi definisi BUT.⁹ Selain itu, terkait PPN, OECD telah menerbitkan panduan pengenaan PPN penyerahan produk digital lintas negara dengan merekomendasikan pemungutan PPN oleh pelaku usaha digital luar negeri

melalui sistem pendaftaran dan administrasi yang sederhana.¹⁰

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan panduan OECD terkait PPN atas impor produk digital, Pelaku Usaha digital luar negeri merupakan pihak yang akan memungut PPN untuk transaksi *business to consumer* (B2C) sedangkan untuk transaksi *business to business* (B2B) mekanisme yang digunakan adalah *reverse charge mechanism*, yaitu penyetoran sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), di mana PPN yang dibayar (Pajak Masukan) dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK).

Sejak panduan pengenaan PPN terkait ekonomi digital terbit, banyak negara di dunia telah mengadopsi ketentuan domestik untuk mengenakan PPN atas impor produk digital. Saat ini, sudah lebih dari 50 negara di dunia yang telah mengadopsi ketentuan PPN digital dengan mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh OECD.¹¹ Pengenaan PPN digital ini telah meningkatkan penerimaan pajak di beberapa negara, contohnya: di Uni Eropa, PPN yang telah dikumpulkan dari

ekonomi digital di Tahun 2018 mencapai US\$5 *billion* dan di Australia sebesar US\$242 *million*.¹²

Terkait pengenaan PPN digital, Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan pemajakan PPN digital sejak Tahun 2020 dalam ketentuan domestik.¹³ Berdasarkan ketentuan domestik tersebut, yaitu PMK 48 dan peraturan pelaksanaannya¹⁴, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan omzet 600 juta rupiah setahun atau 50 juta sebulan dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 setahun atau 1.000 sebulan, dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas penjualan jasa atau harta tidak berwujud kepada konsumen di Indonesia. Setelah dilakukan penunjukan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Pelaku Usaha PMSE luar negeri yang ditunjuk wajib memungut PPN atas penjualan jasa dan/atau barang tidak berwujud kepada konsumen di Indonesia, baik terkait transaksi B2C atau B2B.

Penerapan ketentuan PPN di Indonesia cukup berhasil menambah penerimaan pajak. Sejak penerapan ketentuan tersebut secara efektif mulai Juli 2020, sebanyak 143

⁹OECD, *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report* (OECD, 2015)

¹⁰OECD, *Mechanisms for the Effective Collection of VAT/GST* (OECD, 2017)

¹¹Daniel Bunn dkk, *Digital Taxation Around The World* (Tax Foundation, 2020), hal. 14.

¹²Ibid.

¹³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [selanjutnya disebut PMK 48]

¹⁴Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pelaku usaha PMSE luar negeri telah ditunjuk sebagai Pemungut, dengan total PPN yang telah dipungut sebesar 10.7 triliun rupiah. Pemerintah juga masih akan menunjuk Pelaku usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Pemungut PPN.

Pajak Penghasilan (PPH)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tantangan yang lebih besar dalam mengenakan PPH atas ekonomi digital dibandingkan mengenakan PPN. Dikarenakan PPH dikenakan terhadap pedagang/penyedia jasa luar negeri yang merupakan WPLN, maka mengenakan PPH akan lebih sulit. Selain itu, berdasarkan ketentuan saat ini, negara pasar hanya dapat mengenakan PPH jika terdapat kehadiran fisik di negara pasar. Bagi pelaku usaha PMSE sangat dimungkinkan untuk memperoleh suatu penghasilan dari negara lainnya tanpa harus hadir secara fisik di negara tersebut karena semua transaksi dilakukan melalui internet. Hal ini tentunya merugikan negara pasar karena sangat mudah bagi pelaku usaha PMSE luar negeri menghindari timbulnya BUT di negara pasar, sehingga negara pasar tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari

pelaku usaha tersebut di negara pasar. Berdasarkan penelitian¹⁵, perusahaan digital raksasa, yang biasa disebut *Silicon Six*, yaitu: Amazon, Facebook, Google, Netflix, Microsoft, dan Apple, mempunyai penghasilan global sangat besar, namun pajak yang dibayarkan, hanya sekitar 10%-17% pada Tahun 2010-2019, jauh lebih kecil dibandingkan tarif rata-rata PPH Badan yang masih di atas 30% pada saat itu, sebelum kemudian mengalami penurunan setelah tahun 2017 menjadi di bawah 30%. Sementara itu, rata-rata tarif PPH Badan negara-negara di dunia saat ini berada pada 23.54%.¹⁶

Global Agreement on Pillar One

Adanya tantangan pemajakan ekonomi digital khususnya terkait pengenaan pajak penghasilan inilah yang kemudian mendorong terbitnya rekomendasi BEPS *Action 1 digital economy*. Namun demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari aksi BEPS tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara pasar karena modifikasi definisi BUT pada rekomendasi BEPS *Action 1* masih mendasarkan pada kehadiran fisik di negara pasar. Untuk itu, kemudian negara-negara IF yang difasilitasi oleh OECD

mengusulkan *Two-pillar solution*, khususnya Pilar Satu (*Pillar One*)¹⁷ dalam rangka mengatasi tantangan pemajakan akibat digitalisasi ekonomi.

Solusi dua pilar tersebut telah didukung oleh 137 dari 142 negara anggota IF yang dituangkan dalam suatu pernyataan bersama pada Oktober 2021.¹⁸ Salah satu Pilarnya, yaitu Pilar Satu, ditujukan untuk mengatasi pemajakan ekonomi digital. Tujuan Pilar Satu adalah untuk memberikan alokasi hak pemajakan yang lebih adil bagi negara pasar dengan memberikan realokasi hak pemajakan melalui penerapan *nexus* dan metode alokasi laba baru.

Pilar 1 memperkenalkan basis pemajakan baru (*nexus*) yang memungkinkan negara pasar mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan dari ekonomi digital meskipun tidak terdapat kehadiran fisik di negara pasar. Basis pemajakan baru tersebut dapat berupa penjualan di negara pasar minimum 1 juta euro. Selain basis pemajakan baru, Pilar 1 juga memperkenalkan metode alokasi laba yang baru berdasarkan formula, yaitu, 25% dari laba residual Perusahaan multinasional (*multinational enterprises/ Mnes*) tercakup Pilar Satu.¹⁹ Laba residual merupakan laba di atas 10%.

¹⁵Fair Tax Mark, *The Silicon Six and Their US\$100 Billion Global Tax Gap*, (2019), hal. 11-14

¹⁶Sean Bray, *Corporate Tax Rates around the world*, (Tax Foundation 2021), No. 783, hal. 1

¹⁷OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint* (OECD 2020)

¹⁸OECD, *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy* (OECD 2021)

¹⁹Ibid, hal. 1

Pilar Satu hanya mencakup MNEs dengan omzet konsolidasi lebih dari 20 miliar Euro dan profitabilitas di atas 10%, sehingga dengan batasan tersebut, hanya sekitar 100 MNEs dalam cakupan Pilar Satu. Diantara MNEs yang tercakup Pilar Satu tersebut, sebagian besar adalah Perusahaan digital, yaitu sekitar 52%.²⁰ Dengan demikian, Pilar Satu dapat menyelesaikan sebagian permasalahan pengenaan PPh atas ekonomi digital. Sementara itu, untuk MNEs diluar cakupan Pilar 1, pengenaan pajak penghasilannya tetap mendasarkan pada P3B, sehingga kemungkinan negara pasar dapat memajaki MNEs luar negeri tersebut sangat kecil.

Berdasarkan pernyataan bersama Oktober 2021, Pilar Satu akan diimplementasikan melalui suatu konvensi multilateral yang harus ditandatangani negara-negara IF. Rencana penandatanganan adalah pada semester pertama Tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada Tahun 2024 setelah negara-negara yang paling terdampak Pilar Satu menandatangani dan meratifikasi konvensi sampai dengan akhir tahun 2023 (*critical mass*).²¹ Berdasarkan pernyataan bersama Oktober 2021, sejak 8 Oktober 2021, negara-negara IF tidak diperkenankan mengadopsi

ketentuan pajak digital sampai dengan akhir 2023. Sebaliknya, jika pada akhir 2023 tidak dicapai *critical mass*, maka negara-negara di dunia dapat mengenakan kembali pajak digital karena Pilar Satu tidak dapat diberlakukan efektif.

Critical mass tentunya akan terdiri dari United States (US) yang merupakan negara yang paling terdampak, karena sebagian besar MNEs tercakup Pilar Satu merupakan Perusahaan US. Dengan demikian, Pilar Satu tidak akan dapat diimplementasikan jika US tidak menandatangani dan meratifikasi Pilar Satu sampai dengan akhir Desember 2023. Sementara itu, untuk dapat menandatangani konvensi multilateral, Pemerintah US membutuhkan persetujuan dua-pertiga parlemen.

Baru-baru ini, pada tanggal 10 Februari 2023, Ways and Means Committee Chairman US, Jason Smith, mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal OECD yang mengindikasikan bahwa US tidak mendukung proposal Pilar Satu karena proposal tersebut menargetkan perusahaan-perusahaan US sehingga dapat mengancam lowongan pekerjaan dan penerimaan pajak di US.²² Dalam suratnya, Jason Smith juga menyatakan bahwa US akan melakukan aksi retaliasi terhadap

penerapan pemajakan ekonomi digital oleh masing-masing negara (*unilateral measures*) sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan US *Trade Representative* kepada beberapa negara, termasuk Indonesia.

Dengan adanya surat tersebut, kemungkinan tercapainya *critical mass* yang dipersyaratkan dalam pernyataan Oktober 2021, akan sangat sulit dicapai pada akhir 2023, sehingga terdapat kemungkinan Pilar Satu tidak dapat diberlakukan. Untuk itu, pada Tahun 2024, negara-negara yang sebelum Oktober 2021 telah menerapkan *unilateral measures*, dimungkinkan akan menerapkan DST kembali.

Digital Services Tax (DST)

Sebelum adanya dukungan terhadap Pilar Satu pada Oktober 2021, beberapa negara telah menerapkan *unilateral measures* untuk memajaki penghasilan dari ekonomi digital. Pajak yang diterapkan negara-negara di dunia umumnya dalam bentuk DST. DST merupakan pajak yang dikenakan atas omzet atau penghasilan bruto sehingga bukan merupakan PPh dan tentunya tidak bertentangan dengan P3B. Namun demikian, penerapan DST dapat menimbulkan pajak berganda karena DST tidak dapat dikreditkan sebagai

²⁰OECD, *Economic Impact Assessment Of The Two-Pillar Solution Revenue Estimates For Pillar One & Pillar Two* (OECD 2023)

²¹OECD, *Supra n. 9*, hal 6.

²²Jason Smith, Ways and Means Committee Chairman US (2022)

diakses pada http://waysandmeans.house.gov/w_p-content/uploads/2023/02/Letter-to-Secretary-General-Cormann.pdf

pengurang pajak penghasilan di negara domisili pelaku usaha digital.

Sampai dengan saat ini, sudah lebih dari 20 negara yang telah menerapkan DST, seperti: Prancis, Turki, Italia, Austria, Inggris, Spanyol, Hungaria, New Zealand, India, Kanada dan beberapa negara lainnya. Tarif yang dikenakan pada umumnya 3% atas jasa digital, dengan batasan omzet konsolidasi bagi perusahaan digital sebesar 750 juta euro.²³

Atas penerapan DST oleh Prancis, Turki, India, Inggris, Austria, Spanyol, Brazil, Cheko, Uni Eropa, dan Indonesia, US Trade Representative telah melakukan investigasi sejak 2019 sampai dengan 2021. Laporan investigasi telah diterbitkan untuk Prancis, Turki, India, Inggris, Austria, Spanyol, sedangkan untuk Brazil, Cheko, Uni Eropa, dan Indonesia, investigasi dihentikan karena keempat negara tersebut belum menerapkan DST secara efektif.²⁴ Berdasarkan investigasi dari US tersebut, penerapan DST tidak sesuai dengan konsep perpajakan internasional dan menimbulkan diskriminasi terhadap perusahaan US. Sejak dicapainya kesepakatan atas Two-Pillar pada Oktober 2021, investigasi USTR telah dihentikan dan beberapa negara sepakat untuk

menunda penagihan DST.

Apabila kemudian Pilar 1 tidak dapat mencapai *critical mass*, maka negara-negara di dunia dapat kembali menerapkan DST sehingga potensi terjadinya pemajakan berganda cukup besar. Selain itu, terdapat risiko diterapkannya retaliasi oleh US melalui penerapan tarif yang lebih tinggi atas impor ke US untuk produk-produk tertentu.

Penerapan Pajak Digital di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat kemungkinan Pilar 1 tidak dapat diterapkan karena US sebagai negara yang MNEs nya paling terdampak mengisyaratkan keberatannya untuk menandatangani konvensi multilateral Pilar 1 sampai dengan akhir 2023. Dengan demikian, jika sampai dengan akhir 2023 tidak tercapai *critical mass*, pada Tahun 2024 tidak terdapat larangan bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan pajak digital sebagai *unilateral measures*.

Indonesia, dalam hal ini, juga telah mengadopsi *unilateral measures* seperti DST, yaitu Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. PTE dikenakan atas penghasilan bruto

dari Pelaku Usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan.²⁵ Kriteria kehadiran ekonomi signifikan didasarkan pada omzet konsolidasi global, penjualan domestik, dan pengguna aktif. Batasan kriteria kehadiran ekonomi signifikan tersebut belum diatur sehingga PTE belum dapat diimplementasikan secara efektif.²⁶

Namun demikian, terdapat permohonan *judicial review* yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, di mana putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 bersifat sementara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu, pada saat status pandemi dicabut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak berlaku lagi sehingga keseluruhan substansi dalam undang-undang tersebut juga gugur.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak berlaku lagi, maka PTE secara otomatis tidak berlaku sehingga Indonesia tidak lagi mempunyai dasar untuk menerapkan pajak digital. Jika kemudian Pilar 1 tidak dapat diimplementasikan maka Indonesia perlu membentuk dasar hukum pengenaan pajak digital karena PTE tidak lagi berlaku. Untuk dapat menerapkan

²³Daniel Bunn, *Supra n.3*, hal. 42-43.

²⁴ USTR: 2021

²⁵Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

²⁶Ibid

pajak digital, diperlukan kerangka hukum di luar Undang-Undang PPh, karena pajak digital tersebut merupakan jenis pajak baru di luar PPh dan PPN, sehingga diperlukan kerangka hukum tersendiri. Namun demikian, untuk membentuk Undang-Undang baru membutuhkan waktu yang relatif lama sedangkan Indonesia membutuhkan dasar hukum pengenaan pajak digital yang berlaku mulai Tahun 2024, jika Pilar 1 tidak dapat diterapkan di akhir Tahun 2023.

Namun demikian, jika kemudian Indonesia menerapkan DST, maka perlu dilakukan analisis ekonomi atas kemungkinan diterapkannya retaliasi oleh US. Menurut BPS (2022), neraca perdagangan Indonesia dan US menunjukkan surplus. Pada Tahun 2021, nilai ekspor Indonesia ke US sebesar US\$25,793 juta dan nilai impor sebesar US\$11,249.2 juta, sehingga terjadi surplus perdagangan sebesar US\$14,543.8 juta.²⁷ Dengan kondisi surplus tersebut, jika US menerapkan retaliasi terhadap Indonesia dengan menaikkan tarif impor produk Indonesia, maka Indonesia dapat dirugikan.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara dengan skala ekonomi digital yang sangat besar sehingga

merupakan pasar yang cukup menarik bagi bisnis digital. Namun demikian, meningkatnya ekonomi digital juga menimbulkan risiko dan tantangan dalam pemajakan ekonomi digital. Risiko dan tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pengenaan PPN relatif kecil dibandingkan dengan pengenaan PPh. Berkenaan dengan PPh, ketentuan saat ini hanya mengalokasikan hak pemajakan kepada negara pasar atas laba pelaku usaha digital luar negeri, jika terdapat kehadiran fisik di negara pasar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, negara-negara IF bergabung untuk mengembangkan *two-pillar solution*, khususnya Pilar 1 terkait pengenaan pajak akibat digitalisasi ekonomi. Dengan adanya Pilar 1, negara pasar dimungkinkan untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari pelaku usaha digital luar negeri meskipun tidak terdapat kehadiran fisik di negara pasar. Namun demikian, terdapat kemungkinan Pilar Satu tidak dapat diterapkan secara global karena tidak adanya dukungan dari US.

Apabila Pilar 1 tidak mendapat dukungan negara-negara terdampak sampai dengan akhir 2023, maka Pilar 1 tidak dapat diterapkan kedepannya, sehingga terdapat kemungkinan negara-negara di dunia

akan menerapkan *unilateral measures*, dalam bentuk pengenaan DST sejak Tahun 2024.

Indonesia telah memiliki PTE yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun, undang-undang tersebut tidak akan berlaku lagi jika status pandemi Covid-19 berakhir sebagaimana putusan Mahkamah Agung atas *judicial review* terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian, PTE juga tidak lagi dapat diberlakukan.

Apabila Pilar 1 tidak dapat diimplementasikan dan PTE tidak lagi dapat diberlakukan, maka Indonesia tidak akan dapat mengenakan pajak digital. Untuk dapat mengenakan pajak digital pada Tahun 2024 jika Pilar 1 tidak dapat diberlakukan efektif pada tahun 2023, maka Pemerintah perlu menerbitkan kerangka hukum domestik diluar Undang-Undang PPh dan PPN.

Namun demikian, jika Indonesia menerapkan pajak digital serupa dengan DST, terdapat risiko retaliasi dari US yang dapat saja merugikan Indonesia karena posisi neraca perdagangan Indonesia-US mengalami surplus. Untuk itu, perlu dilakukan analisis ekonomi terkait dampak penerapan retaliasi oleh US.

²⁷Neraca Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, diakses pada <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>



Prof. Mohammad Ikhsan

Pengelolaan Fiskal yang Sinkron dan Berkelanjutan untuk Kini, Esok, dan Nanti

Indha Sendary²⁸

Turbulensi ekonomi global diprediksi masih akan menghantui seluruh negara di tahun ini. Prediksi perlambatan pertumbuhan dunia oleh banyak lembaga internasional, menambah daftar kekhawatiran para aktor pemerintahan, sektor swasta, hingga masyarakat umum di berbagai belahan dunia. Apa yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah dalam menyikapi berbagai dinamika tersebut? Pada edisi Warta Fiskal kali ini, tim redaksi telah mewawancarai Profesor Mohamad Ikhsan, yang merupakan ekonom dari Universitas Indonesia.

Optimis Saat Ini, Namun Tetap Membenahi “Pekerjaan Rumah” Jangka Menengah Panjang

Ditemui di sela-sela kegiatannya sebagai Staf Khusus Menteri BUMN, Pak Ican, begitu ia biasa disapa, mengutarakan optimismenya bahwa dalam jangka pendek, Indonesia akan cukup mampu melewati berbagai risiko global yang terjadi saat ini. Namun, ia menyampaikan Pemerintah perlu mewaspadai dan membenahi “pekerjaan rumah” dari pengelolaan fiskal dalam jangka menengah panjang.

Pertama, dirinya mengungkapkan bahwa

memang selama pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, Indonesia dapat dikatakan berlayar relatif bagus. Namun, sebelum pandemi, ia menilai sesungguhnya anggaran negara belum digunakan secara optimal. Jika dilihat dari *revenue per GDP*, kinerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara – negara *peer*. Hal yang sama juga terjadi pada belanja negara. Belanja negara Indonesia tergolong terlalu rendah sehingga kebutuhan untuk memenuhi fungsi negara yang tergolong mendasar saja masih belum dapat terpenuhi. Agenda “negara hadir saat diperlukan”

²⁸Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

tidak difungsikan secara optimal. Oleh karena itu, reformasi fiskal merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.

Dari sisi penerimaan negara, pria yang juga menjadi salah satu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI ini, menyatakan bahwa penerimaan perpajakan Indonesia yang di tahun 2022 cukup baik -dalam arti adanya tanda-tanda perbaikan, salah satunya dipengaruhi oleh harga komoditas. Menurutnya, sumber tersebut tidak akan *sustainable* dalam jangka menengah panjang mengingat harga komoditas sangat fluktuatif dan dinamis mengikuti kondisi global. Dampaknya, jika harga komoditas anjlok, maka penerimaan perpajakan juga akan menurun. Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki.

Tidak hanya itu, dari struktur penerimaan perpajakan, Ikhsan mengamati bahwa kontributor terbesar penerimaan perpajakan Indonesia, berasal dari pajak penghasilan (pph) badan. Kalau kita lihat lebih mendalam, penerimaan *income corporate tax* ini juga terkonsentrasi pada sedikit perusahaan. Hal ini tidak akan baik untuk keberlangsungan fiskal jangka panjang, karena jika terdapat beberapa perusahaan besar yang "sakit", maka dapat berdampak negatif ke penerimaan Indonesia. Ia pun mengatakan, meski telah terjadi sedikit perbaikan saat

ini, ruang untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak korporasi ini masih terbuka lebar jika kita berhasil melakukan ekstensifikasi (mendorong lebih banyak perusahaan membayar pajak) dan intensifikasi penerimaan pajak (mendorong perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan)

Salah satu faktor yang menyebabkan masih dominannya pembayar pajak dari perusahaan karena kesadaran membayar pajak bagi masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, sistem perpajakan Indonesia masih memiliki banyak *loophole* yang memungkinkan terjadinya tindak penghindaran pajak.

Tak hanya itu, Ia memandang bahwa sistem perpajakan Indonesia saat ini juga masih terbilang rumit. "Seharusnya pajak yang bagus itu *simple*. *Rate*-nya satu, sehingga tidak memungkinkan orang untuk menghindari pajak. Kita masih *too complicated*", ujar pria kelahiran Sigli ini. Salah satu solusi dari hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun *core tax system* (sistem teknologi informasi perpajakan) yang saat ini tengah berjalan. Namun demikian, rezim pajak yang masih terbilang *complicated* ini akan menjadi tantangan dalam pembangunan sistem tersebut.

Sementara itu, dari sisi belanja, Ikhsan melihat bahwa fungsi APBN untuk alokasi dan distribusi belum berjalan dengan efektif. Hanya fungsi

stabilisasi yang menurut mantan Staff Khusus Wakil Presiden Boediono dan Jusuf Kalla ini sudah relatif baik. Stabilisasi yang berjalan cukup baik ini tercermin dari kebijakan fiskal kontra siklus (*counter cyclical*) yang ditempuh pemerintah untuk mendorong belanja ketika ekonomi dalam kondisi lemah.

Selain hal tersebut, tantangan lain dalam belanja APBN yaitu pada desentralisasi fiskal yang masih belum optimal. Menurut Ikhsan, diperlukan suatu gebrakan untuk memperbaiki kebijakan desentralisasi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun tersebut. Perlu adanya penguatan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan belanja untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Di samping itu, tantangan lainnya dalam pengelolaan fiskal yaitu pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam merencanakan dan menganggarkan program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan termasuk untuk pemerintah pusat dan daerah.

Tidak hanya dari sisi penerimaan dan belanja, tantangan selanjutnya adalah *scarring effect* dari pandemi kemarin, yaitu inflasi yang tinggi dan level utang Indonesia. Seperti yang diketahui, dalam UU

Keuangan Negara kita, rasio utang Indonesia dipatok maksimal 60% PDB dengan defisit maksimal 3% sesuai dengan teori Maastricht. Namun Ia menilai, pendekatan Maastricht ini menggunakan negara – negara OECD yang notabene merupakan negara maju sebagai basisnya.

Negara maju menurutnya, memiliki kinerja institusi yang baik. Sementara itu, untuk negara *emerging countries*, dalam penelitian OECD seharusnya di bawah 60% atau sekitar maksimal 40%. Di Indonesia sendiri, rasio utang kita sudah hampir mendekati 40% PDB. Sementara itu, di sisi lain, kenaikan inflasi di level global, menuntut banyak Bank Sentral negara – negara di dunia menaikkan suku bunga. Hal ini akan berdampak pada kenaikan biaya bunga utang Indonesia.

Tantangan menengah dan jangka panjang lainnya ialah perubahan iklim. Pemerintah perlu mengalokasikan belanja untuk menangani hal tersebut. Selain itu, terkait ketahanan pangan. Sistem irigasi sebagai salah satu solusi untuk ketahanan pangan, perlu diperbaiki. Di satu sisi penerimaan masih belum optimal, namun kebutuhan belanja ke depan akan bertambah besar. Berbagai tantangan ini lah yang harus dapat ditangani oleh pemerintah, tidak hanya untuk pemerintahan saat ini, tetapi juga untuk pemerintahan selanjutnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek,

Indonesia masih mampu untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Namun, untuk jangka menengah dan panjang serta struktural, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk membuat struktur APBN kita menjadi lebih baik.

Orkestrasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Jadi Kunci dalam Menghadapi Tantangan Jangka Pendek

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik menjadi krusial dalam menghadapi tantangan jangka pendek di tahun 2023 yang masih penuh dengan ketidakpastian. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menikmati buah dari tingginya harga komoditas di tahun 2022 melalui penerimaan pajak yang tinggi. Namun seperti prediksi banyak pihak, harga komoditas di tahun 2023, tidak akan setinggi di tahun sebelumnya. Tentu, ini akan menjadi salah satu tantangan pada penerimaan perpajakan Indonesia yang menjadi sumber utama dalam mendorong pembangunan dan ekonomi.

Untuk mengantisipasi penerimaan negara yang diprediksi tidak akan setinggi tahun lalu, pemerintah perlu melakukan orkestrasi baik dari sisi belanja dan defisit. Selain itu, dibutuhkan upaya untuk mempercepat reformasi perpajakan. Penegakan hukum (*law enforcement*)

juga merupakan aspek yang harus terus didorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, optimalisasi teknologi informasi juga perlu diperhatikan. Saat ini, pembangunan sistem *core tax* tengah berjalan, dalam tahapan ini, penting untuk memerhatikan rezim perpajakan yang memiliki berbagai jenis peraturan yang harus sinkron satu sama lain. Ini menurutnya juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk terus mempercepat reformasi perpajakan di seluruh aspek.

Selain itu, dengan penerimaan yang diprediksi moderat, pemerintah perlu menjaga konsolidasi fiskal sesuai dengan rencana agar rasio utang dan defisit tetap terkendali. Independensi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter yang efektif juga berperan penting. "Jangan sampai di tahun yang mendekati tahun politik ini, kebijakan moneter disetir menjadi kebijakan yang populis", tambahnya. Independensi merupakan kunci bagi otoritas moneter agar tetap mampu menetapkan kebijakan berdasarkan asesmen mereka terlepas dari kondisi politik yang sedang terjadi.

Sementara dari sisi krisis, termasuk krisis keuangan yang baru – baru ini melanda Amerika Serikat, Ikhsan meyakini hal tersebut akan terus berulang, sehingga

perlu ada antisipasi oleh Pemerintah dalam menghadapi siklus tersebut. Kuncinya, pemerintah atau regulator harus *agile* dan fleksibel dalam mengantisipasi perubahan dan inovasi yang tumbuh cepat di sektor keuangan. Fleksibilitas memungkinkan pemerintah untuk berkembang dan lebih mudah menelurkan kebijakan dalam menghadapi kejadian luar biasa termasuk krisis.

Tak Hanya Fiskal, Sinkronisasi Kebijakan dan Aspek Hukum Perlu Terus Diperkuat

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam pembangunan. Namun, masih banyak aspek lain yang juga harus dibenahi, salah satu kuncinya ialah dengan melakukan reformasi hukum (*legal reform*). Ikhsan meyakini bahwa *legal system* memainkan peranan penting dalam mengatasi tantangan dalam pengelolaan fiskal.

Untuk itu, aparat yang menjalankan fungsi hukum perlu untuk diperhatikan. Penegakan hukum perlu diperkuat agar tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaan anggaran baik dari sisi penerimaan maupun belanja. "*Legal system* menjadi elemen yang sangat penting supaya fungsi pajak dapat berjalan dengan benar, sehingga *revenue* dari pajak bisa bertambah dan *spending* pun bisa lebih baik", ujar Ikhsan.

Sementara, untuk mencapai level pertumbuhan 5%, Ikhsan

mengungkapkan bahwa hal tersebut terbilang mudah selama desain kebijakan yang dibuat efektif. Namun saat ini, Ikhsan memandang bahwa kebijakan Indonesia masih belum optimal untuk menarik berbagai investasi dari luar sebagai salah satu sumber untuk mendorong pertumbuhan Indonesia.

Isu *supply side* harus ditangani dengan mendorong daya saing melalui inovasi teknologi dengan menarik lebih banyak investasi langsung (*foreign direct investment*). Pemerintah juga perlu secara konsisten dalam menyusun kebijakan dan tidak membuat kebijakan yang kontra produktif dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi. Publikasi terkini dari Bank Dunia terkait dengan penanganan sisi kapasitas Perekonomian suatu negara bisa dijadikan referensi penting.

Ia pun mencontohkan, dari sisi manufaktur misalnya, Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam, China, dan Thailand. Hal ini terjadi karena adanya tantangan di peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Biaya atau ongkos untuk pekerja masih tinggi, terutama untuk kewajiban pesangon. Aspek tersebut menjadi penting bagi investor atau perusahaan karena pola perusahaan manufaktur yang memiliki siklus kontrak kerja yang relatif pendek, sehingga biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar jika masa

kontrak telah berakhir.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan dalam berinvestasi. Jika terdapat ketidakpastian yang tinggi dalam berinvestasi, maka calon investor cenderung akan mencari negara yang memiliki iklim investasi yang baik, termasuk dari segi kepastian hukumnya. Untuk itu, pemerintah perlu terus memastikan stabilisasi politik, dan konsistensi dari sisi peraturan serta hukum, agar risiko semakin terukur sehingga Indonesia dapat menjadi negara tujuan investasi yang aman dan nyaman bagi investor.

Menutup perbincangan, Ikhsan mendorong *public discourse* juga perlu dioptimalisasi. Menurutnya, untuk membangun Indonesia, diperlukan *intellectual challenge* yang berasal dari berbagai pihak yang kompeten dan kritis untuk bersama mencari solusi dalam setiap tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia. "*Public discourse* perlu dibuka untuk memperoleh input yang konstruktif dari publik untuk mencari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi", ucapnya. Kritik yang membangun untuk Pemerintah menjadi penting agar Indonesia mampu menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan cita – cita di tahun 2045.



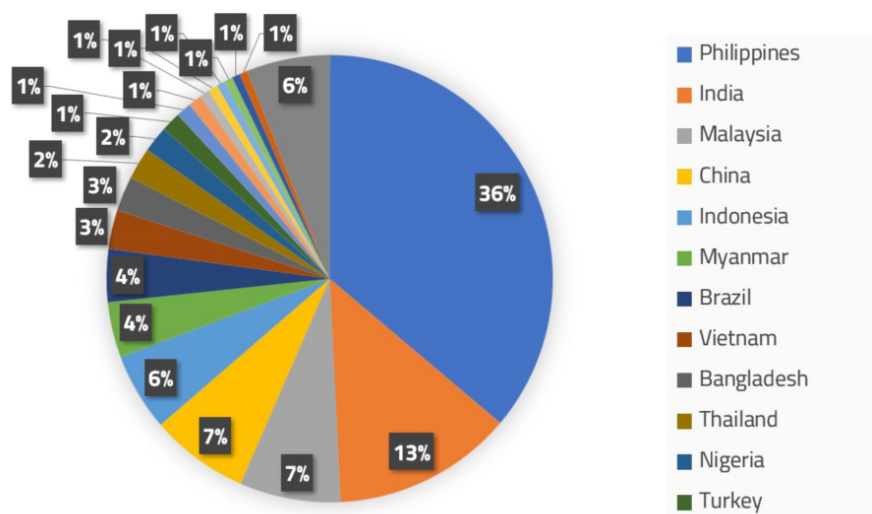
Menimbang Rencana Penerapan Cukai Plastik

Yanuar Widiyanto²⁹

Indonesia memiliki permasalahan yang serius terkait dengan pengelolaan sampah plastik. Merujuk pada penelitian Meijer, et.al (2021), Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbanyak kelima di dunia setelah Filipina, India, Malaysia, dan China, dimana Indonesia diklaim menyumbang sampah plastik ke lautan sebanyak 0,82 juta ton setiap tahunnya.

Permasalahan sampah plastik ini tidak bisa

Gambar 1. Negara Penyumbang Sampah Plastik di Lautan



Sumber: Meijers, et. al (2021), data diolah.

²⁹Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

dipandang sebelah mata, mengingat eksternalitas negatif yang ditimbulkan sangat banyak diantaranya adalah meningkatnya kasus pencemaran air dan pencemaran tanah serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Penanganan sampah yang tidak baik juga akan memberikan dampak negatif pada emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Padahal, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari sektor limbah sebesar 11 juta ton CO₂ dengan skenario tanpa bantuan internasional atau 26 juta ton CO₂ dengan bantuan internasional (KLHK, 2016).

Apabila dilihat dari segi penanganannya saat ini sampah plastik yang tertangani baru mencapai angka 36%, 44% tidak tertangani dan mencemari lingkungan, sedangkan sekitar 20% masuk ke sistem informal, seperti bank sampah, untuk didaur ulang. Masalah ini diperburuk oleh kebiasaan dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah. Untuk itu diperlukan intervensi Pemerintah untuk menurunkan laju pertumbuhan sampah plastik.

Mengurangi Sampah Plastik

Terdapat dua tipe cara untuk mengurangi sampah plastik, yaitu preventif dan kuratif. McKinsey (2009) telah melakukan penelitian

yang menghitung biaya dan manfaat dua langkah tersebut. Pada tipe preventif digunakan daur ulang sampah dan pada tipe kuratif digunakan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa langkah preventif lebih efisien dari sisi biaya. Sedangkan, dari sisi manfaat, langkah kuratif diklaim memiliki manfaat yang lebih besar.

Jika mengambil kesimpulan dari McKinsey (2009), maka seharusnya langkah mengurangi sampah plastik berfokus pada tipe preventif. Beberapa alternatif kebijakan preventif untuk mengurangi sampah plastik diantaranya adalah pengenaan kantong plastik berbayar, pengenaan cukai produk plastik, dan *refundable deposit*.

Dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, Pemerintah Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pernah memberlakukan penggunaan kantong plastik berbayar seharga Rp200/lembar. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Februari 2016. Pada awalnya, respon masyarakat yang mendukung kebijakan ini cukup besar dan bersedia membawa kantong belanja sendiri. Namun, kebijakan ini sempat berhenti karena banyaknya keluhan dan protes dari masyarakat mengenai tidak jelasnya pengelolaan dana hasil

pengenaan kantong plastik berbayar. Apalagi belum semua provinsi serta retail/toko menerapkan kantong plastik berbayar. Sehingga kebijakan ini kurang efektif menekan penggunaan kantong plastik karena adanya *asymmetric information* dan potensi *moral hazard*. Namun, pada Maret 2019 Aprindo kembali mengenakan pungutan atas kantong plastik sebesar Rp200/lembar, walaupun pada praktiknya tidak semua retail dan pertokoan melaksanakan aturan ini.

Cukai merupakan instrumen fiskal yang dikenakan atas barang tertentu sebagai upaya Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi atas barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Dalam rangka mengendalikan penggunaan produk plastik yang memiliki eksternalitas negatif, sudah sepatutnya pemerintah perlu mengenakan cukai terhadap produk plastik. Rencana

pengenaan cukai produk plastik tersebut sudah dimulai ketika Pemerintah pertama kalinya menetapkan target penerimaan cukai produk plastik pada UU APBN 2017.

Pengenaan cukai produk plastik merupakan bentuk internalisasi biaya eksternalitas terhadap harga produk plastik. Dalam jangka pendek pengenaan cukai akan membuat produsen mengurangi kuantitas produksi plastik dan secara tidak langsung akan membuat harga naik. Namun, dalam jangka panjang kebijakan ini akan mendorong adanya perubahan teknologi yang lebih maju dan ramah lingkungan (*green technology*) sehingga produsen akan mampu mengurangi biaya produksinya atau memproduksi barang menggunakan kemasan ramah lingkungan sehingga harga akan kembali turun. Jika berkaca pada pengalaman negara lain, sudah terdapat sekitar 36 negara yang menerapkan cukai terhadap produk plastik dengan Jerman merupakan negara pertama yang menerapkannya.

Selain pengenaan kantong plastik berbayar dan cukai produk plastic, langkah untuk mengurangi sampah plastik dapat menggunakan metode *refundable deposit*. Sistem *refundable deposit* merupakan aplikasi dari teori *circular economy* di mana limbah dari suatu produk dapat diubah dan digunakan untuk menjadi

suatu produk baru. Sistem ini sudah diimplementasikan di beberapa negara Eropa seperti Kroasia, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Islandia, Lithuania, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Prinsip dari sistem *refundable deposit* adalah produsen akan mengembalikan sejumlah uang kepada konsumen saat kemasan dari barang yang dikonsumsi dikembalikan kepada produsen atau pusat pengumpul. Hal ini semakin memberikan kesadaran bahwa kemasan suatu produk memiliki nilai ekonomis. Semakin tinggi nilai ekonomis kemasan suatu produk, maka konsumen memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi membuang kemasan tersebut sebagai sampah plastik. Tidak hanya untuk konsumen, *refundable deposit* sejatinya juga dapat menguntungkan produsen karena dapat meningkatkan kuantitas kemasan suatu produk dari hasil daur ulang yang tentunya dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya produksi.

Menimbang Alternatif

Penerapan kantong plastik berbayar efektif menekan penggunaan produk plastik, walaupun begitu terdapat *asymmetric information* hasil dari kantong plastik berbayar, dan berpotensi menimbulkan *moral hazard*. Adapun penerapan *refundable deposit* baik untuk dilakukan, namun kebijakan *refundable deposit*

lebih sesuai jika diserahkan langsung kepada perusahaan ataupun bank sampah swasta sebagai implementasi *circular economy*.

Sebagai salah satu alternatif kebijakan penanganan sampah plastik, kebijakan pengenaan cukai pada produk plastik dinilai lebih efisien. Hal ini karena telah adanya kelembagaan resmi yang dapat mendukung implementasi hal tersebut, termasuk dalam hal pengelolaan dan penggunaan hasil penerimaan cukai, serta atas pengelolaan dan pengawasan dana bagi hasil dari pengenaan cukai tersebut. Selain itu, kebijakan cukai produk plastik juga secara tidak langsung dapat mendorong penciptaan *green technology* sehingga dalam jangka panjang kebijakan ini memiliki dampak positif yaitu lahirnya teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan sehingga berdampak pada meningkatnya daya saing industri dan kelestarian lingkungan.



Mengurai Kebijakan Utang Pemerintah

Immanuel Bekti Hartanto³⁰ & Mohamad Nasir³¹

Paska krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997/1998, utang Pemerintah semakin meningkat. Kondisi ini bukanlah tanpa alasan, kebijakan APBN yang ekspansif dan berutang digunakan untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pertumbuhan ekonomi mutlak dibutuhkan sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah berupaya pula mempertahankan daya beli masyarakat kelompok kurang mampu melalui belanja subsidi yang dialokasikan dan dikeluarkan melalui

APBN. Selain itu, Pemerintah juga mencoba melakukan distribusi hasil pembangunan dan kesejahteraan ke seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.

Pemenuhan kebutuhan anggaran melalui utang semakin meningkat ketika dunia, termasuk Indonesia, mengalami pandemi COVID 19 di awal tahun 2020. Di samping tetap berupaya mempertahankan kebijakan di masa sebelum pandemi, Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanganan COVID 19, dan pemulihan ekonomi. Dalam penanggulangan Covid-19, Pemerintah membutuhkan dana untuk pembelian vaksin yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Pemerintah juga memberikan subsidi bunga, subsidi listrik, subsidi lpg 3 kg, dan bantuan sosial lainnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dan masyarakat yang terdampak pandemi. Di tengah penurunan pendapatan negara, utang adalah sebuah keputusan yang harus diambil, bukan lagi sebuah opsi.

Meskipun utang telah menjadi kebutuhan, kebijakan utang telah menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Terdapat pihak yang pro dan tentunya ada yang kontra terhadap kebijakan utang Pemerintah. Berangkat dari pro dan kontra tersebut, artikel ini bermaksud mengurai bagaimana pengelolaan utang oleh Pemerintah.

³⁰Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

³¹Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Utang Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan

Dalam kondisi pendapatan negara yang terbatas, melakukan penarikan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan merupakan sesuatu yang wajar dilakukan oleh Pemerintah, dan tentunya didukung dengan alasan-alasan yang kuat dan rasional. Sesuai amanah konstitusi, Pemerintah mempunyai kewajiban kepada masyarakat seperti kesejahteraan, keamanan dan kecerdasan bangsa. Untuk mencapainya, Pemerintah memerlukan dana yang terhimpun dalam suatu rencana keuangan (anggaran) yang disebut dengan APBN.

APBN digunakan untuk mendanai kegiatan kenegaraan dan operasional Pemerintah. Tidak berhenti begitu saja, APBN juga mempunyai fungsi sebagai stimulus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan bangsa, dan pendistribusiannya ke seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan

kewajiban Pemerintah bagi masyarakat sesuai dengan Amanah konstitusi. APBN mendanai belanja subsidi, belanja kesehatan, belanja pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, dan lain sebagainya. Melalui belanja subsidi, Pemerintah mencoba meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu. Melalui belanja pendidikan dan kesehatan, Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia. Selanjutnya, melalui belanja pembangunan infrastruktur, Pemerintah mencoba untuk mendistribusikan secara adil kegiatan pembangunan, kesejahteraan, dan lainnya keseluruh wilayah Indonesia. Berikut gambaran ringkas belanja negara berdasarkan fungsi sebelum dan selama pandemi terjadi pada Tabel 1.

Sebelum munculnya pandemi covid-19 kebutuhan pembiayaan utang dalam APBN 2020 diperkirakan mencapai Rp351,8 triliun. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun

2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, defisit APBN diperlebar dari 1,76% terhadap PDB menjadi 6,34% terhadap PDB seiring kebutuhan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, serta belanja-belanja yang lain untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyesuaian tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam rangka penanganan dampak dari pandemi sekaligus sebagai implementasi dari kebijakan *countercyclical* untuk pemulihan ekonomi.

Kebijakan ini berdampak pada pembiayaan utang tahun 2020 yang mencapai Rp1.229,6 triliun atau meningkat sangat signifikan hingga 181% dibandingkan pembiayaan utang tahun 2019. Pada tahun 2021, pembiayaan utang menurun 29,2% dibandingkan tahun 2020, sementara itu realisasi pembiayaan utang tahun 2022 turun 20,9% dibanding tahun 2021. Penurunan

pembiayaan utang 2021 dan 2022 tersebut terjadi seiring dengan menurunnya defisit APBN terutama karena membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi penggunaan SAL. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ketika kebutuhan APBN dapat dipenuhi dari pendapatan,

Tabel 1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

KODE	FUNGSI	(Rp miliar)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP (unaudited)	APBN	APBN	
1	PELAYANAN UMUM	275,123.4	307,147.2	375,196.1	400,090.7	537,820.0	550,929.9	627,121.3	664,079.9	
2	PERTAHANAN	98,248.9	117,506.6	106,832.3	115,424.5	136,908.2	125,798.8	134,645.4	134,309.5	
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	113,349.7	135,748.1	143,305.8	147,956.0	154,107.6	157,367.9	176,676.4	182,607.4	
4	EKONOMI	288,344.9	307,787.5	382,420.9	358,426.6	399,930.0	461,402.6	399,963.6	634,126.1	
5	LINGKUNGAN HIDUP	8,941.5	10,613.7	13,709.6	16,094.0	13,041.8	13,996.1	14,109.2	13,134.7	
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	27,816.9	27,277.4	32,198.0	26,622.5	22,784.1	30,621.5	17,291.7	317,265.0	
7	KESEHATAN	59,639.0	57,225.1	61,869.7	71,006.9	105,088.5	211,368.0	139,502.1	96,621.2	
8	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4,379.5	5,770.6	10,700.0	4,229.9	3,151.8	4,113.8	3,725.7	3,559.7	
9	AGAMA	8,463.2	8,870.4	9,379.0	11,218.8	9,488.0	10,098.3	10,598.6	11,168.7	
10	PENDIDIKAN	131,974.0	138,507.3	145,941.7	155,160.2	155,113.1	162,291.3	169,230.4	234,089.0	
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	137,737.3	148,905.5	173,771.6	190,083.7	295,517.8	272,675.2	251,678.0	241,035.2	
	JUMLAH	1,154,018.2	1,265,359.4	1,455,324.9	1,496,313.8	1,832,950.9	2,000,663.5	1,944,542.3	2,246,457.9	

Sumber: Kementerian Keuangan

maka pembiayaan utang akan turun, namun ketika kebutuhan APBN tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan, maka pembiayaan utang akan dioptimalisasi.

Dalam penarikan utang, Pemerintah mempertimbangkan masa jatuh tempo atau tenor utang. Strategi pembiayaan utang juga dilakukan dengan memprioritaskan utang dengan tenor jangka menengah dan panjang. Hal ini sangat rasional ketika melihat profil utang jatuh tempo ke depan yang semakin menurun di jangka menengah dan panjang. Dengan prioritas utang pada tenor menengah dan panjang, Pemerintah telah terlihat mengukur kemampuan APBN dan sustainabilitas serta menjaga keseimbangan belanja APBN ketika akan melakukan pinjaman.

Dominasi Utang Dalam Rupiah

Dalam penarikan utang, baik melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman, sebagian besar utang Pemerintah dilakukan dalam mata uang Rupiah. DJPPR (2022) melaporkan bahwa Pemerintah mampu meningkatkan porsi utang negara dalam mata uang Rupiah. Per Desember 2011, porsi outstanding utang dalam mata uang Rupiah mencapai 54,9%, meningkat menjadi 58,7% di tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 70,0% pada tahun 2021 dan menjadi 70,8% pada tahun 2022.

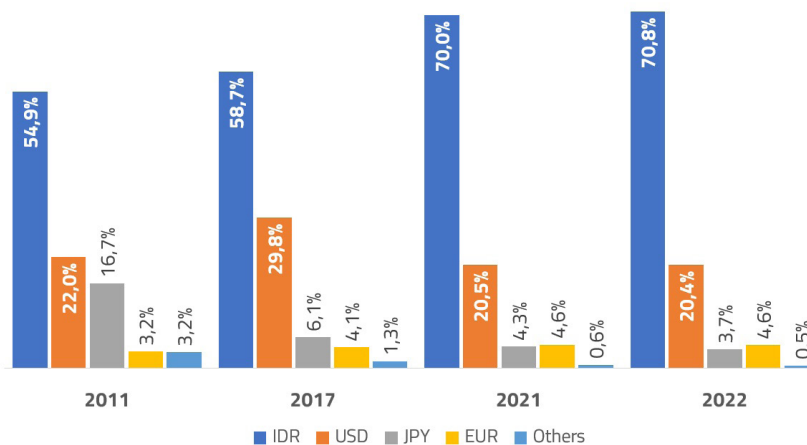
Dominasi utang dalam mata uang Rupiah merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang yang *prudent* dari Pemerintah, dalam kaitannya dengan memitigasi risiko depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (USD). Selama ini, telah diketahui bahwa nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi dan cenderung terdepresiasi terhadap mata uang USD sebagaimana terlihat dalam grafik-2. Oleh karena itu, semakin besar

porsi utang dalam Rupiah, maka semakin kecil risiko bertambahnya utang ketika nilai Rupiah terdepresiasi. Perkembangan dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD dapat terlihat dalam grafik-2.

Jumlah Utang Yang Rasional

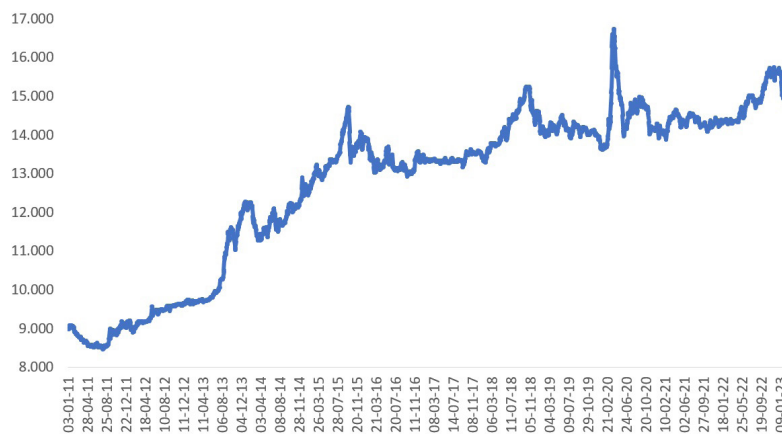
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *debt to GDP ratio* yang aman adalah maksimal

Grafik 1. Proporsi Utang berdasarkan mata Uang

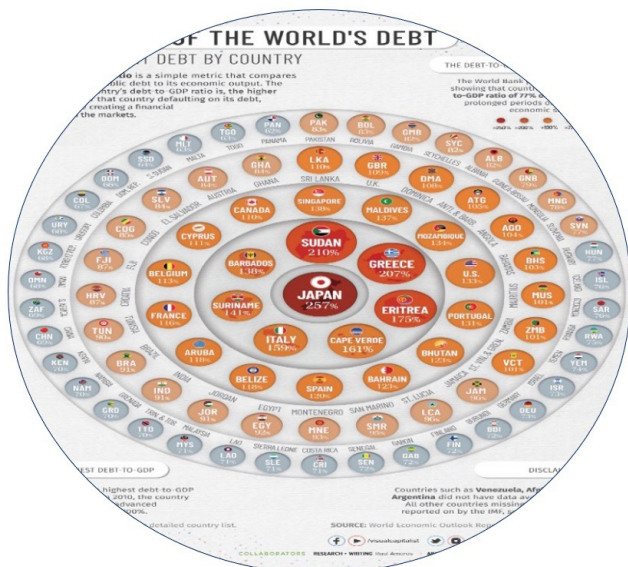


Sumber: DJPPR. 2022

Grafik 2. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD (Kurs Tengah BI)



Gambar 1. Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB



Sumber: Visualcapitalist.com. 2022

60%. Secara regulasi, utang Pemerintah dapat dikatakan masih aman dan memenuhi ketentuan UU karena masih di bawah 60%, tepatnya 39,57% per Q4 2022.

Terkait dengan batas aman *debt to GDP ratio*, sesungguhnya belum dapat dikatakan sebagai indikator harga mati, dalam artian rasio yang tinggi (> 60%) akan selalu menunjukkan bahwa negara yang memilikinya akan mengalami kebangkrutan. Pada kenyataannya, terdapat negara-negara maju yang memiliki *debt to GDP* yang lebih tinggi dari 60% namun tidak menunjukkan sebagai negara yang bangkrut.

Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, Singapura, Perancis, Italia, Inggris, Portugal, Canada sebagaimana terlihat dalam gambar-1 merupakan beberapa contoh negara yang memiliki *debt to GDP ratio* di atas 100% per 2021, dan

bukan negara-negara yang dinyatakan sebagai negara yang bangkrut.

Penutup

Pemerintah melakukan penarikan utang sebagai salah satu sumber pendanaan APBN, khususnya untuk menutup defisit APBN. Defisit diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam mendorong peningkatan pelayanan, kesejahteraan, kapasitas dan kualitas masyarakat. Pemerintah juga mendorong adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia agar distribusi kesejahteraan dapat terjadi secara merata. Karenanya, Pemerintah secara konsisten membangun infrastruktur dasar seperti infrastruktur ketenagalistrikan, jalan, pelabuhan dan bandara. Dengan kata lain, utang merupakan instrumen fiskal untuk mendukung kebijakan

fiskal yg ekspansif untuk menstimulus perekonomian dan menghindari opportunity loss

Di tengah pendapatan negara yang terbatas dan tuntutan akan pencapaian target pembangunan, penarikan utang oleh Pemerintah merupakan sesuatu yang rasional dan dimungkinkan sepanjang dikelola secara prudent dan produktif. Banyak negara di dunia yang melakukannya, termasuk negara-negara maju yang tidak asing lagi. Bahkan utang mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia bila dilihat dari indikator *debt to GDP ratio*. Kecemasan beberapa pihak terkait dengan risiko sebagai akibat meningkatnya utang Pemerintah juga dapat dipahami. Namun demikian, seiring dengan adanya risiko terdapat juga kesempatan di dalamnya. Oleh karena itu, hal yang paling baik adalah mengelola risiko dengan baik (*professional, prudent dan sustainable*) sehingga dapat mengambil kesempatan yang ada menjadi hal yang bermanfaat secara optimal. Dari uraian di atas, terlihat Pemerintah dapat dikatakan telah melakukan pengelolaan utang dengan baik.



Menilik Pola Penerimaan PPN dari Aktivitas Ekspor-Impor & Pola Konsumsi Rumah Tangga

Slamet Widodo³²

Pajak merupakan tulang punggung pembangunan. Bila dilihat berdasarkan jenis pajaknya, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh) nonmigas. Dalam kurun 10 tahun terakhir, penerimaan PPN dan PPnBM berkontribusi sekitar 41% dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2022, penerimaan PPN mencapai Rp687,59 triliun atau tumbuh 24,59% dibandingkan penerimaan

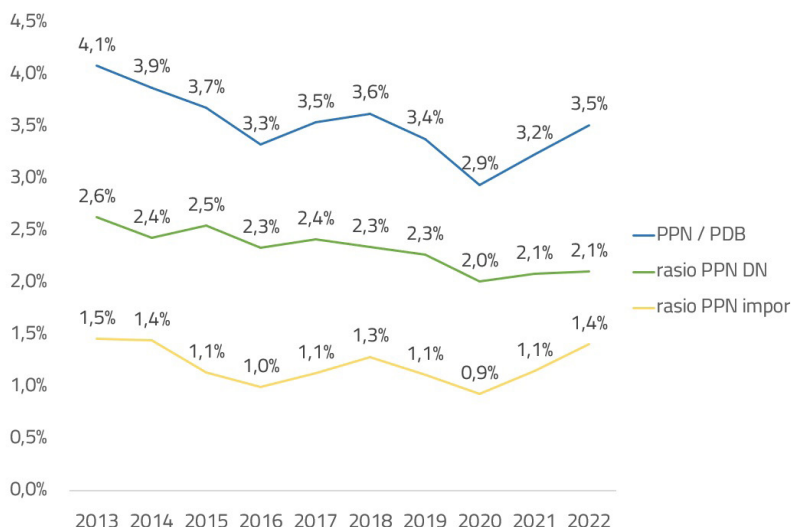
PPN tahun 2021. Sementara itu, penerimaan PPh nonmigas tahun 2022 mencapai Rp920,37 triliun atau tumbuh 42,95% dibandingkan pajak penghasilan tahun 2021 (APBN Kita, Januari 2023).

Dilihat dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), rasio PPN terhadap PDB dalam tahun 2020 s.d. 2022 mengalami kenaikan, yaitu dari 2,9% (2020) menjadi 3,5% (2022). Namun, jika dilihat dari periode tahun 2013 s.d. 2022, rasio PPN tersebut cenderung menurun, yaitu

dari 4,1 % (2013) menjadi 3,5 % (2022) (**Gambar 1**). Hal ini penting untuk mendapat perhatian mengingat PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Oleh karena itu, perlu dicari faktor-faktor utama secara ekonomi yang mendorong kenaikan/ penurunan rasio PPN terhadap PDB untuk mendapat penjelasan apakah kondisi naik dan turunnya rasio PPN terhadap PDB tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi.

³²Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Gambar 1. Rasio PPN terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, data diolah

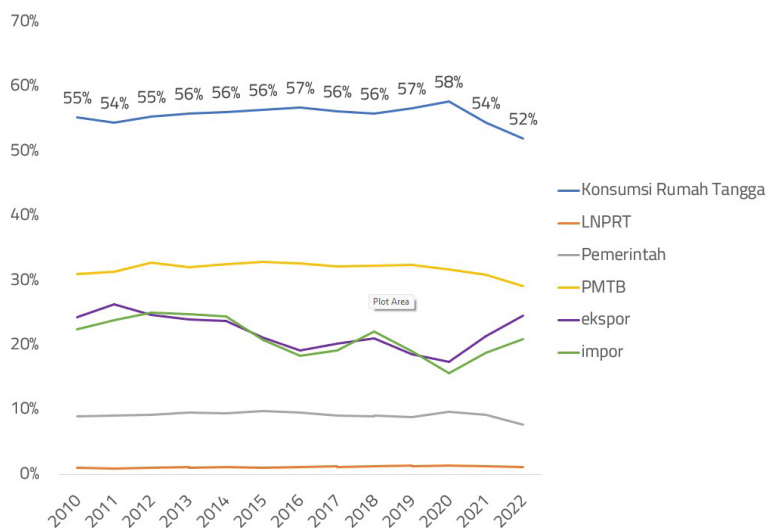
PPN dapat dibagi menjadi PPN dalam negeri (PPN DN) dan PPN impor seperti terlihat dalam **Gambar 1**. PPN DN lebih besar dibandingkan PPN impor. PPN DN rata-rata sekitar 1,9 % lebih besar dibandingkan PPN impor. Dari **Gambar 1**, terlihat bahwa perkembangan rasio PPN impor terhadap PDB signifikan mempengaruhi perkembangan rasio PPN terhadap PDB. Ketika rasio PPN impor naik signifikan, maka rasio PPN terhadap PDB terdorong naik signifikan dan sebaliknya. Sementara itu, perkembangan rasio PPN DN juga sejalan dengan perkembangan rasio PPN. Rasio PPN DN dalam periode tahun 2013 s.d. 2022 cenderung menurun, namun perkembangannya tidak terlalu fluktuatif. Dalam periode yang panjang, terlihat bahwa turunnya rasio PPN terhadap PDB dipengaruhi oleh turunnya rasio PPN DN terhadap PDB, sedangkan fluktuasi rasio PPN terhadap

PDB dipengaruhi oleh fluktuasi rasio PPN impor terhadap PDB.

Fluktuasi rasio PPN impor terhadap PDB sangat dipengaruhi oleh fluktuasi rasio impor terhadap PDB. Misalnya, pada periode tahun 2018 s.d. 2020 rasio impor terhadap PDB menurun, sementara dalam

periode tahun 2020 s.d. 2022 rasio impor terhadap PDB meningkat (**Gambar 2**). Perkembangan rasio impor tersebut sejalan dengan perkembangan rasio PPN terhadap PDB. Hal ini disebabkan oleh pungutan PPN impor yang dilakukan pada saat barang impor masuk sebesar tarif kali harga barang yang kena pajak dan PPN tersebut langsung masuk ke negara. Kondisi ini menjadi keuntungan pada saat terjadi impor yang tinggi yang dapat menaikkan rasio PPN, namun hal ini juga berisiko. Impor yang naik tinggi dapat menjadi ancaman bagi produk dalam negeri. Ketika produk dalam negeri kalah bersaing, maka potensi PPN DN kemungkinan turun karena PPN DN akan turun jika konsumsi produk DN turun. Dalam jangka panjang, jika rasio PPN impor naik terus, maka ada risiko rasio PPN DN akan menjadi turun.

Gambar 2. Struktur PDB Pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Di samping itu, impor yang tinggi berkaitan dengan ekspor yang tinggi, dan sebaliknya. Dalam **Gambar 2** terlihat bahwa perkembangan ekspor sejalan dengan perkembangan impor dengan rasio yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekspor yang tinggi membutuhkan barang impor sebagai barang modal atau bahan baku yang tinggi juga. Aktivitas ekspor dipengaruhi oleh harga komoditas di luar negeri. Dalam tahun 2020 s.d. 2022, aktivitas ekspor meningkat signifikan dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas yang signifikan. Kondisi ini kemungkinan tidak terjadi di tahun mendatang. Harga komoditas kemungkinan mulai menurun sehingga aktivitas ekspor-impor juga kemungkinan akan menurun meskipun mungkin masih tinggi. Oleh karena itu, rasio PPN impor terhadap PDB berpotensi menurun di tahun mendatang sebagai dampak turunnya rasio impor terhadap PDB.

PPN merupakan pajak konsumsi DN yang dilakukan oleh rumah tangga (RT). Meskipun PPN sudah dipungut dari proses produksi, tetapi pada akhirnya yang menjadi penerimaan PPN adalah pengenaan atas barang yang dikonsumsi. Untuk barang yang akhirnya diekspor, PPN yang telah dipungut atas

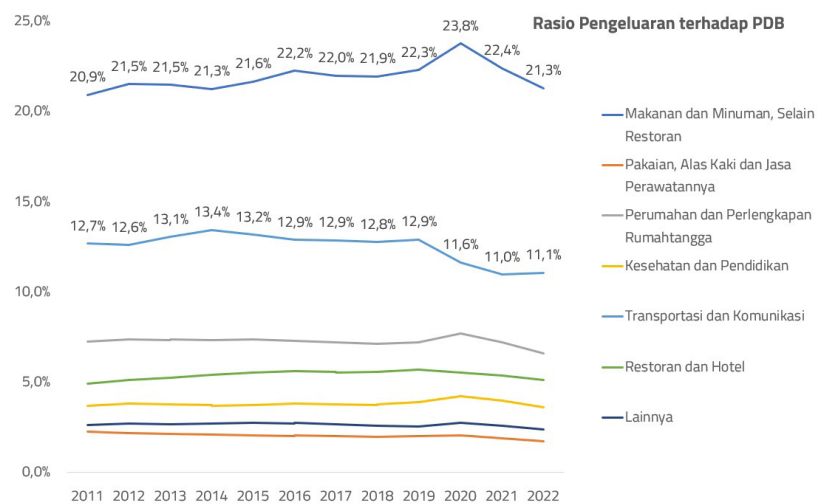
bahan baku barang tersebut akan direstitusi sehingga barang yang diekspor tidak mengandung PPN. Oleh karena itu, perkembangan PPN tahunan dapat dilihat dari perkembangan konsumsi RT tahunan.

Dilihat dari perkembangan rasio konsumsi RT (**Gambar 2**) dan perkembangan rasio PPN DN (**Gambar 1**), terlihat bahwa perkembangannya tidak sejalan. Dalam periode tahun 2011 s.d. 2022, rasio konsumsi RT cenderung meningkat sementara rasio PPN DN cenderung turun. Dalam periode tahun 2020 s.d. 2022, rasio konsumsi RT cenderung turun sementara rasio PPN DN cenderung naik. Perkembangan PPN seharusnya sejalan dengan perkembangan konsumsi RT. Jika tidak sejalan, maka perlu dilihat lebih detail jenis pengeluaran konsumsi RT karena konsumsi RT ada yang

dikenai PPN ada yang tidak dikenai PPN. Hal ini untuk memastikan konsumsi RT yang mana yang mendorong naik/turunnya PPN.

Terdapat 2 jenis pengeluaran konsumsi RT yang besar, yaitu makanan dan minuman selain restoran (lebih dari 20 % PDB), dan pengeluaran transportasi dan komunikasi (antara 11 s.d. 14 % PDB). Perkembangan rasio pengeluaran makanan dan minuman, selain restoran berpengaruh signifikan terhadap perkembangan rasio konsumsi RT karena porsi pengeluaran tersebut paling besar sehingga perkembangannya sejalan. Perkembangan pengeluaran transportasi dan komunikasi cukup berpengaruh terhadap perkembangan konsumsi RT, namun perkembangannya belum tentu sejalan. Perkembangan pengeluaran yang lain relatif stabil

Gambar 3. Rasio Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

dan relatif kecil (di bawah 10%) sehingga tidak terlalu mempengaruhi rasio konsumsi RT.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio PPN DN yang tidak sejalan dengan perkembangan rasio konsumsi RT dipengaruhi oleh perkembangan rasio konsumsi makanan dan minuman, selain restoran. Bahan makanan banyak mendapat fasilitas bebas PPN. Kenaikan rasio pengeluaran makanan dan minuman, selain restoran, meskipun mendorong kenaikan rasio konsumsi RT tetapi justru menurunkan rasio PPN DN. Dalam periode tahun 2020 s.d. 2022, rasio konsumsi RT yang menurun yang didorong oleh penurunan rasio pengeluaran makanan dan minuman, selain restoran berdampak pada naiknya rasio PPN DN.

Perkembangan rasio pengeluaran transportasi dan komunikasi relatif sejalan dengan perkembangan rasio PPN DN. Dalam periode tahun 2013 s.d. 2022, rasio pengeluaran transportasi cenderung menurun, yaitu dari 13,1 % (2013) menjadi 11,1 % (2022). Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan rasio PPN DN yang menurun di periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi dan komunikasi

lebih banyak yang dikenai PPN sehingga naik/turunnya pengeluaran tersebut mendorong naik/turunnya PPN DN.

Kenaikan rasio ekspor terhadap PDB yang signifikan dalam periode tahun 2020 s.d. 2022 berisiko terhadap rasio PPN DN. Barang yang diekspor dikenai PPN dengan tarif 0 %, sehingga pajak masukan atas barang yang diekspor berpotensi direstitusi. Sebagian restitusi PPN atas ekspor barang tahun 2022 kemungkinan terjadi pada tahun 2023. Restitusi PPN tersebut menjadi pengurang PPN DN sehingga tingginya ekspor tahun 2023 berpotensi mengurangi PPN DN tahun 2023.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio PPN DN terhadap PDB tahun 2023 memiliki risiko penurunan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tingginya ekspor pada tahun 2022 berpotensi meningkatkan restitusi PPN tahun 2023. Selain itu, pengeluaran transportasi dan komunikasi yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir juga berpotensi menyebabkan rasio PPN DN melemah. Demikian pula halnya dengan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman selain restoran yang meningkat di tahun

2023 pasca pemulihan ekonomi, pada gilirannya dapat berpengaruh pada melemahnya rasio PPN DN. Adapun rasio PPN impor yang meningkat signifikan meskipun dalam jangka pendek mendorong rasio penerimaan PPN secara keseluruhan, namun dalam jangka panjang dapat berisiko pada penurunan rasio PPN DN apabila rasio PPN impor tetap tinggi di masa mendatang. Impor yang tinggi berpotensi melemahkan daya saing produk dalam negeri sehingga dalam jangka panjang bukan hanya dapat melemahkan penerimaan PPN DN, tetapi juga penerimaan pajak secara keseluruhan.



PSO Tepat Sasaran atau PSO Transportasi? Belajar dari KRL Jabodetabek

Agunan Paulus Samsir³³

Akhir Desember 2022, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan pernyataan yang cukup menarik dengan menyebutkan bahwa tarif KRL tidak mengalami kenaikan selama tahun 2023. Pemerintah akan menerapkan kartu khusus bagi penumpang terutama masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Penumpang yang memiliki kategori tersebut akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.

Pernyataan yang disampaikan Menteri Perhubungan tentu saja mengejutkan banyak pihak terutama penumpang yang sudah bertahun-tahun menggunakan KRL Jabodetabek. Pro dan kontra terkait pernyataan tersebut

bermunculan sampai dengan pertengahan Januari 2023. Sebelum pengumuman tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian menyatakan bahwa Kemenhub sudah menyiapkan aturan-aturan terkait kebijakan tarif KRL akan naik pada awal tahun 2023.

Saat ini, KRL telah menjadi moda angkutan utama bagi masyarakat Jabodetabek untuk beraktivitas. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya volume penumpang yang menggunakan KA Jabodetabek dari tahun ke tahun. Volume penumpang pada tahun 2006 yang mencapai 104.425.000 orang naik sekitar 300% di tahun 2019 mencapai 336.045.000 orang, atau naik rata-rata

9,41% per tahun. Jumlah penumpang per hari pada tahun 2006 adalah sebesar 286.096, meningkat menjadi 920.671 orang pada tahun 2019.

Awal Maret 2020, tidak pernah ada yang menduga bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan hampir semua sektor kegiatan usaha mengalami penurunan secara drastis. Beberapa kegiatan ekonomi dilakukan di rumah atau *work from home* (WFH) selama setahun lebih. Kegiatan bisnis dan penyediaan makanan/minuman (restoran) banyak yang tutup karena tidak ada yang membeli. PT KCI sebagai anak perusahaan yang ditugaskan untuk mengoperasikan KRL

³³Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Jabodetabek juga merasakan pandemi Covid-19.

Volume penumpang pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 143.261.000 orang (volume Januari – Desember 2020) atau 392.496 penumpang per hari. Volume tersebut adalah sebesar 42,63% dibandingkan tahun 2019. Jumlah penumpang mulai meningkat seiring dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Presiden Jokowi pada akhir Desember 2022.

Gambaran penurunan volume penumpang tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat signifikan. Gambar 1. menunjukkan bahwa tahun 2015, rata-rata masyarakat yang menggunakan KRL sekitar 705.562 per hari. Peningkatan jumlah penumpang sebesar 23,5 persen sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya hanya 571.216 penumpang per hari. Tahun 2016, jumlah penumpang yang menggunakan KRL meningkat sebesar 9 persen yaitu menjadi 768.736 per hari. Jumlah penumpang pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 921.527 penumpang per hari. Memasuki kwartal ketiga tahun 2019, rata-rata per hari jumlah penumpang mencapai 913.781.

Pada saat pandemi tahun 2020, jumlah penumpang mengalami penurunan drastis menjadi 423.529 per hari. Dan puncaknya tahun 2021, jumlah

penumpang terus menurun menjadi 346.817 per hari. Seiring dengan pemberian vaksin 1, 2 dan booster yang diberikan pemerintah dan pembatasan PPKM semakin longgar, jumlah penumpang tahun 2022 terus meningkat rata-rata menjadi 597.164 per hari.

Meningkatnya jumlah penumpang KRL Jabodetabek di era endemi menunjukkan bahwa angkutan kereta api tetap merupakan moda transportasi pilihan utama bagi masyarakat Jabodetabek. Era pandemi dan masa pemulihan, sebagian masyarakat masih memilih kendaraan pribadi sebagai moda transportasi untuk beraktivitas. Akibatnya, jalanan disepanjang Kota Jakarta masih mengalami kemacetan dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyaknya masyarakat terutama warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi beralih ke angkutan publik disebabkan antara lain: (i) harga tiket KRL Jabodetabek

yang terjangkau terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu, (ii) frekuensi keberangkatan dari stasiun asal ke tujuan semakin sering, (iii) waktu tempuh yang diperkirakan sejak berangkat sampai tujuan. Ketepatan waktu tempuh memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bekerja, dan (iv) sarana angkutan KRL Jabodetabek yang semakin nyaman. Pendingin ruangan di gerbong/sarana terus meningkat. Hampir tidak ditemukan sarana yang menggunakan kipas angin sebagai penyejuk gerbong.

Public Service Obligation (PSO)

Jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang naik dan turun mengakibatkan alokasi PSO atau beban subsidi juga meningkat atau tetap setiap tahunnya. Alokasi subsidi yang disediakan untuk KRL Jabodetabek pada tahun 2012 hanya sebesar Rp134,29 miliar, meningkat hampir lima kali lipat pada tahun 2014 menjadi Rp524,87

Gambar 1. Volume Penumpang KRL Jabodetabek 2014-2022



Sumber: PT KCI, 2023

miliar. Meningkatnya jumlah penumpang pada tahun 2015 mengakibatkan bertambahnya beban subsidi yang diberikan ke penumpang KRL Jabodetabek menjadi Rp975,51 miliar.

Jumlah subsidi KRL Jabodetabek tahun 2015 untuk pertama kalinya melebihi PSO pada KA ekonomi dan kereta rel diesel (KRD) ekonomi. Pemberian subsidi KRL Jabodetabek cenderung lebih tinggi dibandingkan KA dan KRD ekonomi. Hal ini menunjukkan dukungan Pemerintah terhadap angkutan publik KRL Jabodetabek semakin besar setiap tahun.

Beban subsidi pada tahun 2016 menembus angka Rp1,10 triliun. Pada tahun 2017 subsidi yang diberikan ke penumpang KRL Jabodetabek mencapai Rp1,26 triliun atau sekitar 60,24 persen dari total subsidi angkutan kereta api. Jumlah subsidi pada tahun 2018 terus meningkat yaitu Rp1,29 triliun, sementara tahun 2019 sebesar Rp1,31 triliun.

Walaupun jumlah penumpang tahun 2020-2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Jumlah PSO tetap naik karena adanya kenaikan biaya operasional dan kenaikan harga BBM akibat pandemik serta krisis Ukraina-Rusia. Sementara itu, tarif KRL tidak mengalami kenaikan. PSO tahun 2020 tetap tinggi yaitu sebesar Rp1,51 triliun dan 2021 naik menjadi Rp2,01 triliun. Pada tahun 2022, PSO KRL

Jabodetabek sebesar Rp1,8 triliun dan tahun 2023, PSO diperkirakan sebesar Rp1,6 triliun.

Berdasarkan data PSO di atas, terlihat setiap tahunnya PSO yang diberikan terus meningkat dan berpotensi memunculkan masalah pada isu PSO KAI terutama PSO KRL Jabodetabek akan membebani APBN setiap tahunnya. Beban ini semakin meningkat karena tidak adanya penyesuaian tarif KRL Jabodetabek sejak 2016.

Sebenarnya, pemerintah telah mencoba menaikkan tarif KRL Jabodetabek tahun 2021. Beberapa kajian seperti *willingness to pay* (WTP) dan *ability to pay* (ATP) telah disampaikan oleh YLKI, Instran dan Kemenhub. Namun, penyesuaian tarif belum dapat dilaksanakan sampai saat ini.

Keputusan untuk menyesuaikan tarif saat ini semakin berat ditengah beban kenaikan harga yang dihadapi seluruh masyarakat. Pada 3 September 2022, Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekitar 33%. Kenaikan ini cukup besar dan berimplikasi menaikkan harga barang dan jasa. Sektor yang paling terpukul adalah transportasi yang masih bergantung kepada penggunaan BBM.

Public service obligation (PSO) atau yang dikenal dengan kewajiban pelayanan publik atau adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat perbedaan harga

pokok penjualan (HPP) badan usaha atau operator dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (Kemenkeu, 2007). Oleh karena itu, menyediakan angkutan publik yang aman, cepat dan nyaman dengan harga terjangkau menjadi kewajiban Pemerintah.

PSO KRL Jabodetabek

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan pemberian PSO KRL Jabodetabek adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan publik. Pemberian subsidi ini diberikan ke seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat layak atau tidak layak penumpang memperoleh subsidi. Tujuan pemberian PSO tersebut sejalan dengan Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Shifting penggunaan kendaraan pribadi (konsumsi energi tinggi) ke transportasi umum (konsumsi rendah karbon) untuk mengurangi konsentrasi emisi GRK di udara pada tahun 2030 sebesar 29%. Pemberian subsidi terhadap pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke KRL merupakan insentif yang patut diberikan oleh Pemerintah. Pemberian subsidi/PSO model ini adalah

PSO Transportasi yang mendorong masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan KRL Jabodetabek yang nyaman, aman, tepat waktu dan harga tiket terjangkau.

Survei yang dilakukan YLKI (2021) cukup mengejutkan bahwa sebanyak 95,5% pengguna KRL Jabodetabek tetap menggunakan KRL meskipun tarif dinaikkan. Bila tarif naik Rp2.000 pada 25 km pertama dan naik Rp1.000 setiap 10 km hanya mengurangi jumlah penumpang sebanyak 3 persen. Kenaikan tarif KRL bila dilakukan saat ini adalah wajar. Bila tarif naik, penumpang meminta layanan yang diberikan PT KCI terutama sarana perlu ditingkatkan.

Untuk mengetahui profil penumpang seperti jenis pekerjaan, penghasilan dan asal berangkat ke tujuan yang menggunakan KRL Jabodetabek dapat dilihat dari beberapa survei yang dilakukan lembaga penelitian. Data PT KCI menunjukkan bahwa sekitar 50% pengguna KRL berasal dari Bogor, Depok dan sekitarnya, sedangkan sekitar 25% berasal dari Cikarang dan Bekasi, dan sisanya berasal dari Rangkas Bitung dan Tangerang. Dengan demikian, masyarakat yang paling banyak menikmati subsidi/PSO angkutan KRL Jabodetabek adalah masyarakat Bogor.

Hasil survei LM FEUI (2016) menunjukkan bahwa penumpang KRL Jabodetabek

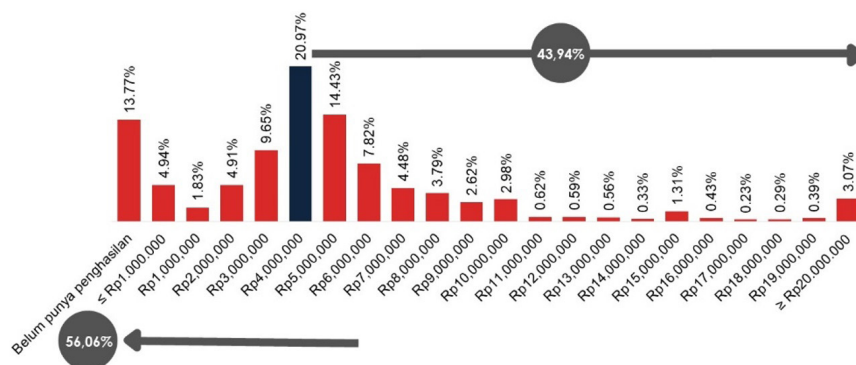
yang memiliki penghasilan Rp3 juta – Rp7 juta per bulan sebanyak 63,78%. Sedangkan survei yang dilakukan YLKI-KAI-DJKA Kemenhub pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penumpang yang memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta sebanyak 56,06% dan di atas atau lebih dari Rp4 juta sebanyak 43,94%. Kelompok pengguna sebanyak 43,94% ini dapat dikategorikan sebagai kelompok mampu yang memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan Kota Jakarta, Kota Bogor dan Kota Depok tahun 2022 sebesar Rp4.641.854, Rp4.638.926 dan Rp4.694.493. Sedangkan UMR Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Bekasi adalah Rp4.285.798, Rp4.280.214 dan Rp5.055.874. Penumpang yang memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta inilah yang menjadi potensi penerima subsidi atau PSO KRL Jabodetabek yang berkategori tepat sasaran dan layak untuk dibantu oleh Pemerintah. Gambar 2 berikut

adalah profil pengguna KRL Jabodetabek.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, PSO tepat sasaran belum dapat diterapkan pada waktu dekat ini. Pengenaan tarif keekonomian bagi sebagian penumpang KRL Jabodetabek akan memberatkan dan beralih ke kendaraan pribadi. Akibatnya, tujuan pemberian subsidi/ PSO kepada penumpang yang berhak (tepat sasaran) menjadi tidak selaras dengan tujuan pemberian PSO. Sedangkan PSO Transportasi masih relevan diterapkan untuk beberapa tahun ke depan, kenaikan tarif sebesar Rp2.000-Rp3.000 pada 25 km pertama tidak berdampak negatif terhadap masyarakat pengguna KRL Jabodetabek. Tujuan pemberian PSO tetap tercapai dan penurunan PSO akibat kenaikan tarif dapat dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan dukungan APBN.

Gambar 2. Profil Pengguna KRL Jabodetabek



Sumber: Survei YLKI-KAI-DJKA, diolah, 2021.



Kebijakan Moneter Amerika Serikat (AS)

Wahyu Septia Wijayanti³⁴, Andi Yoga Trihartanto³⁵ & Dwi Anggi Novianti³⁶

Kebijakan perekonomian Amerika Serikat (AS), termasuk kebijakan moneternya, selalu penting dan relevan bagi sebagian besar negara-negara mengingat ukuran perekonomiannya yang sangat besar serta sentralitasnya dalam sektor keuangan dunia. Setahun terakhir, kebijakan moneter AS telah kembali menciptakan dinamika yang memberi efek signifikan pada ekonomi global serta menyita perhatian publik dan pembuat

kebijakan di seluruh dunia. Tingkat inflasi tinggi, hingga mencatatkan rekor dalam beberapa dekade, yang dipicu oleh disrupsi suplai dan tensi geopolitik telah mendorong bank sentral di banyak negara untuk melakukan intervensi moneter, termasuk di AS. Bahkan pengetatan moneter yang dilakukan AS dalam setahun terakhir terhitung sangat agresif. Sebagai negara dengan besaran ekonomi terbesar di dunia, kebijakan moneter

AS tentu memiliki dampak signifikan bagi perekonomian negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Sekilas Mengenai Kebijakan Moneter Amerika Serikat

The Federal Reserve (The Fed) merupakan bank sentral AS yang memiliki mandat ganda dari *The Congress* AS untuk menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan lapangan kerja melalui instrumen suku bunga. Secara

^{34,36}Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

³⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

lebih spesifik, *Federal Open Market Committee* (FOMC) bertanggung jawab atas keputusan kebijakan moneter untuk mencapai tingkat suku bunga yang moderat demi mencapai tujuan tersebut. FOMC menentukan posisi (*stance*) kebijakan moneter yang tepat dalam setiap dinamika ekonomi. Setelah FOMC menentukan sikap kebijakan yang tepat, FOMC memberikan arahan pada *Open Market Trading Desk* (*Desk*) di New York untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Secara umum, kebijakan moneter akan menjadi lebih "akomodatif" dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada situasi ekonomi yang lemah, dan menjadi lebih "restriktif" pada saat ekonomi mengalami *overheating*. Kebijakan moneter akomodatif dirancang untuk menjaga suku bunga tetap rendah demi menambah jumlah uang beredar ke dalam perekonomian sehingga meningkatkan lapangan kerja, yang biasanya dilakukan bank sentral melalui penambahan likuiditas di pasar keuangan antara lain lewat pembelian surat berharga di pasar keuangan dan penurunan suku bunga. Sebaliknya, kebijakan moneter restriktif dirancang untuk mengurangi jumlah uang beredar (antara lain melalui penjualan surat berharga milik bank sentral dan peningkatan suku bunga), yang pada gilirannya diharapkan dapat meredakan

tekanan permintaan dalam perekonomian, sehingga harga-harga yang meningkat dapat kembali stabil. Kebijakan ini juga sering dikenal dengan kebijakan moneter kontraktif karena berdampak pada perlambatan ekonomi. Melalui kebijakan akomodatif-restriktif ini, FOMC mengarahkan *Desk* yang dikomandoi oleh *The New York Fed* untuk melakukan operasi pasar terbuka, yakni pembelian dan penjualan sekuritas, baik secara langsung ataupun melalui perjanjian pembelian kembali dengan dealer utama dan mitra dagang *The New York Fed* lainnya. Transaksi ini selanjutnya mempengaruhi ukuran dan komposisi neraca *The Fed*, yang mendukung *stance* kebijakan moneter FOMC. Perubahan suku bunga jangka pendek yang dilakukan melalui kebijakan moneter mempengaruhi ketersediaan likuiditas dan biaya kredit dalam perekonomian sehingga mempengaruhi pula keputusan ekonomi yang dibuat oleh rumah tangga maupun bisnis. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi kondisi finansial secara lebih luas yang diukur dengan harga aset finansial seperti harga saham dan obligasi, suku bunga jangka panjang, dan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang asing. Secara keseluruhan rangkaian ini mempengaruhi aktivitas ekonomi tidak hanya di AS semata, melainkan juga negara-negara lain di seluruh

dunia, sehubungan dengan terkoneksiya pasar keuangan antarnegara di dunia.

Fed Funds Rate (FFR)

Instrumen utama yang dimiliki FOMC dalam menentukan *stance* kebijakan moneter adalah melalui perubahan suku bunga acuan (*policy rate*), yang lazim dikenal dengan istilah *Fed Funds Rate* (FFR). Secara periodik, *The Fed* mengumumkan kisaran target FFR pasca rapat FOMC sebanyak delapan kali per tahun. FFR diterapkan atas transaksi antara bank dan entitas lain yang memenuhi syarat untuk meminjam dan meminjamkan saldo rekening mereka di *The Fed* secara *overnight*, tanpa jaminan. Saldo akun ini, atau saldo cadangan, adalah simpanan yang dipegang oleh institusi yang memenuhi syarat untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk memenuhi kewajiban pembayaran, mengelola risiko likuiditasnya, dan mematuhi rasio peraturan terkait. Untuk mempertahankan FFR dengan baik dalam kisaran target, *The Fed* menetapkan dua suku bunga utama yang dikelola, yaitu *Interest on Reserve Balances* (IORB) dan *Overnight Reverse Repo Facility* (ON RRP).

Quantitative Easing

Quantitative Easing (QE, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom

Jerman Richard Werner di tahun 90an dan diterapkan oleh Bank of Japan di 2001-2006 untuk mengatasi deflasi domestik) adalah kebijakan moneter yang terbilang baru (non konvensional) untuk AS dan dunia, serta termasuk bagian dari kebijakan moneter akomodatif atau longgar karena pada dasarnya memompa likuiditas segar ke sistem keuangan dengan melakukan ekspansi aset bank sentral. Dunia mengasosiasikan QE sebagai kebijakan yang mirip dengan "printing money" atau "pencetakan" uang baru oleh bank sentral. Dari segi implementasinya, QE secara umum tetap menggunakan kebijakan moneter konvensional, yaitu operasi pasar terbuka, antara lain dengan melakukan pembelian surat berharga negara, perbankan, serta insitusi keuangan dan non-keuangan lainnya.

Di AS, QE diimplementasikan ketika perekonomian menghadapi kondisi krisis yang ditandai dengan kontraksi ekonomi dan inflasi sangat rendah, sedangkan instrumen moneter konvensional menjadi kurang efektif karena tingkat suku bunga yang hampir mendekati nol. Secara historis, AS telah menjalankan QE untuk menghadapi *Global Financial Crisis* (GFC) dan pandemi. Meskipun QE dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, terdapat debat akademik tentang

kemungkinan dampaknya dalam meningkatkan risiko inflasi, menyebabkan *asset bubbles*, serta memperburuk *income equality*³⁷.

Kebijakan Pengetatan Moneter AS 2022 dan Dampaknya Bagi Indonesia

Pada awal tahun 2022 lalu, kebijakan moneter AS kembali menjadi sorotan publik ketika Bank Sentral AS (*The Fed*) mengumumkan untuk melakukan *tapering* (pengurangan program stimulus yang sebelumnya telah diberikan / perlambatan laju *quantitative easing*). Pilihan ini diambil karena berbagai kebijakan fiskal dan moneter *extraordinary* yang diambil Pemerintah AS untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, meskipun berhasil menjaga pemulihan ekonomi sejak kuartal III 2020 sampai dengan 2021, telah membuat neraca *The Fed* melonjak sampai hampir menyentuh sekitar 9 triliun USD (dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi pada kisaran 4 triliun USD). Pada saat yang sama, perekonomian AS menunjukkan indikasi *overheating*, dengan inflasi yang melonjak menjadi 7,5% yoy dan tingkat pengangguran yang turun ke 4%. Kondisi tersebut lantas mendorong *The Fed* mengeksekusi kebijakan pengetatan moneter, yang dilakukan melalui kenaikan suku bunga dan pengurangan aset obligasi

dalam neraca *The Fed*.

Kebijakan ini menjadi *concern* bagi negara-negara *emerging market*, seperti Indonesia, karena selama empat dekade terakhir, siklus pengetatan moneter AS telah memicu perlambatan ekonomi di AS serta sering kali diikuti oleh krisis keuangan di negara-negara *emerging market*, seperti di antaranya krisis keuangan Amerika Latin 1994-1995, krisis keuangan Asia 1997-1998, serta krisis keuangan global 2008-2009.

Secara umum, pengetatan moneter AS memiliki dampak rambatan (*spillover effects*) bagi negara *emerging market* seperti Indonesia setidaknya melalui jalur perdagangan, pasar finansial, dan nilai tukar. Dari jalur perdagangan, tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan memicu penurunan permintaan agregat di AS, yang selanjutnya dapat berimbas pada penurunan permintaan komoditas ekspor negara mitra dagang, seperti Indonesia. Dari jalur pasar finansial, kenaikan suku bunga akan mendorong penarikan modal kembali ke AS (sering dikenal dengan istilah *capital outflow*) sehingga menekan pasar keuangan dalam negeri. Kenaikan suku bunga AS biasanya juga akan direspons dengan kenaikan suku bunga domestik, yang pada gilirannya dapat memicu kontraksi pada konsumsi dan juga investasi dalam negeri. Kondisi ini kemudian akan

³⁷Beberapa di antaranya Huston & Spencer, 2018; Morgan, 2011; dan Lee, 2021

mempengaruhi nilai tukar melalui penguatan mata uang dollar AS karena aksi pelepasan rupiah / pembelian dollar dalam jumlah besar. Meskipun apresiasi USD dapat membuat barang ekspor Indonesia menjadi relatif lebih murah (dengan demikian lebih kompetitif), namun dampak secara total masih ambigu mengingat volume ekspor juga mungkin berkurang. Meskipun bukan hal yang sama sekali baru, kebijakan pengetatan moneter AS pada tahun 2022 cukup berbeda dengan yang sebelumnya karena beberapa hal berikut. Pertama, kebijakan ini diambil dalam kondisi perekonomian global yang cukup menantang, di mana tekanan inflasi tinggi yang terjadi sangat persisten, yang dipicu oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan akibat beberapa faktor seperti *pent-up demand*, disrupsi rantai suplai, serta tensi geopolitik yang muncul dari perang di Ukraina. Hal ini terjadi di tengah pemulihan global pasca pandemi yang masih rapuh dan tidak merata. Kedua, laju pengetatan moneter AS 2022 merupakan yang paling agresif sepanjang sejarah, di mana suku bunga *The Fed* naik dari 25 bps menjadi 475 bps hanya dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.

Dalam konteks yang demikian, kebijakan pengetatan moneter AS memberikan tantangan yang lebih besar bagi *emerging market* seperti

Indonesia. Pengendalian inflasi domestik menjadi semakin kompleks karena otoritas moneter juga perlu menyeimbangkan dengan usaha untuk menstabilisasi kurs mata uang domestik di tengah situasi ekonomi yang sedang berusaha pulih dari pandemi COVID-19. Selain itu, mengingat kenaikan suku bunga AS juga diikuti oleh kenaikan suku bunga di perekonomian lain di seluruh dunia, *cost of financing* menjadi semakin tinggi dan berisiko memicu *debt distress* terutama apabila sektor swasta dan rumah tangga memiliki tingkat utang yang tinggi. Kenaikan suku bunga global juga menyebabkan tekanan pada pembiayaan APBN karena biaya utang yang semakin tinggi untuk membiayai kebijakan fiskal ekspansif untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Respons Indonesia dalam Menjaga Resiliensi

Dalam merespons kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah proaktif untuk memitigasi dampak rambatan pengetatan kebijakan moneter AS pada perekonomian domestik, melalui stabilisasi fiskal, moneter, dan sektor riil. Dari sisi fiskal, pemerintah mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan kualitas belanja termasuk belanja subsidi dan bansos yang lebih tepat sasaran, serta menjaga defisit

APBN dalam rentang yang berkesinambungan untuk meminimalkan eksposur APBN terhadap kenaikan *cost of financing*. Manajemen utang publik yang lebih proaktif juga dilakukan dengan mengembangkan *debt service profile* yang lebih berkesinambungan serta mengembangkan pasar uang dan pasar modal domestik untuk meningkatkan resiliensi keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada utang eksternal.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke target, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta melakukan jual beli Surat Berharga Negara di pasar sekunder untuk stabilisasi kurs rupiah. Pada sektor riil, Bank Indonesia dan Pemerintah juga secara proaktif melakukan kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar, dan memperkuat koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta Pemerintah Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem

keuangan, serta memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor usaha prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Lebih jauh lagi, Pemerintah dan *stakeholder* terkait juga terus memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan global dalam rangka memperkuat *global and regional safety net* serta menyukseskan agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 dan Presidensi Indonesia pada ASEAN tahun 2023.

Hasilnya, kinerja perekonomian Indonesia termasuk salah satu yang paling resilien di tengah kebijakan pengetatan moneter yang agresif di AS dan berbagai negara di dunia. Sepanjang 2022 perekonomian Indonesia tumbuh 5,3%, dengan suku bunga BI berada pada tingkat 5,75% dan tingkat inflasi yang relatif moderat dibanding negara *peers* yaitu di tingkat 5,3%. Dampak pada jalur perdagangan relatif moderat karena kinerja sektor eksternal Indonesia relatif *solid*, yang direfleksikan dengan surplus transaksi berjalan selama 33 bulan berturut-turut mengingat masih cukup kuatnya permintaan ekspor dan harga komoditas. Sementara itu, tekanan sektor keuangan yang dihadapi Indonesia relatif moderat dibanding negara-negara G-20 dan ASEAN-6, yang direfleksikan oleh

kenaikan imbal hasil surat utang domestik Pemerintah terjaga di bawah 1 *percentage point* dan IHSG tahun 2022 yang masih tumbuh 4,09% yoy di saat sebagian besar indeks saham negara *peers* mengalami penurunan seperti Tiongkok (-15,1%), Jepang (-9,37%), Hongkong (-15,4%), dan Korea (-24,8%). Dari aspek nilai tukar, sepanjang 2022 depresiasi rupiah juga relatif lebih moderat dibandingkan dengan mata uang pada negara-negara lain. Sejak awal tahun 2023, pergerakan rupiah secara *year-to-date* bahkan mulai bergerak positif sebesar 2,7% terhadap dollar AS, dibanding pelemahan yang dialami mata uang negara lain, seperti Vietnam (-0,8%), Jepang (-2,4%), dan Korea (-2,7%).

Ke depannya, Pemerintah dan *stakeholder* terkait akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang kuat dengan memanfaatkan *key emerging trends* seperti digitalisasi, ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan *human capital*, dalam rangka mendorong produktivitas untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi yang kuat serta penciptaan lapangan kerja demi mencapai visi jangka panjang mencapai Indonesia Maju sebelum 2045.

BERANI/ TOLAK



GRATIFIKASI

Jangan biarkan gratifikasi membatasi kesuksesanmu!
Pertahankan kejujuranmu dan beranilah untuk bersih dari gratifikasi
dengan membangun karier sebagai ASN yang bermartabat!
Lapor jika ada yang mencoba meminta!
Tolak jika ada yang mencoba memberi!



Sang Penakluk Beasiswa 4 Negara

Rosyid Bagus Ginanjar³⁸

Gadis Jawa itu terburu-buru meninggalkan pintu gate Penang International Airport Malaysia menuju sebuah pesawat di ujung garbarata. Di sepanjang perjalanan, ia membaca buku berjudul '2024 Hijrah untuk Negeri dan Islamisasi Sasak' untuk menutupi rasa sedih karena sebuah kabar mendadak. Sudah tiga hari ini, bapaknya di rawat intensif di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Sejak Nensy lahir 23 tahun lalu, Sang Bapak menambahkan kata Setyaningrum di belakang nama anak pertamanya yang baru lahir sebagai lambang kebahagiaan di dalam jiwa. Harapannya, kelak jika

sudah dewasa Sang Putri bisa menjadi pribadi yang kuat sebagaimana karakter 'mbarep Jawa' tahan banting (batin/fisik) dan Rum sebagai simbol Prajnaparamita.

Cerminan itu menjadi kenyataan tepat setahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia. Pertengahan Maret 2021 seperti ada kilatan petir yang menyambar di atas kepala. Ia harus menghadapi fakta mengejutkan, drop out (DO) dari kampus perjuangan PKN STAN. Kampus favorit bagi anak-anak muda seperti ini sebab setelah lulus kelak akan diangkat menjadi abdi negara. Seperti orang desa pada umumnya, orang tua

Nensy sangat berharap sang putri jadi PNS – strata sosial tertinggi bagi orang di kampungnya.

Di semester ketiga PKN STAN, Nensy hanya mendapat IP di bawah 2,75. Padahal di dua semester sebelumnya ia mendapatkan predikat cumlaude dengan IPK 3,5. Pandemi mengubah sistem pembelajaran yang semula *offline* menjadi *online*. Nensy merasa kesulitan belajar akuntansi secara daring sebab ada sekat yang tidak bisa ditembusnya saat belajar mandiri dari rumah tanpa pendampingan fisik.

"Kala itu saya belum bisa aktualisasi diri dengan optimal jika hanya duduk di

³⁸Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal



depan laptop. Mungkin masih belajar adaptasi dengan teknologi sebab selepas lulus mondok di pesantren, saya baru punya handphone dan tidak ada teman belajar," ungkap jebolan Pondok Pesantren Darul Falah Kudus Jawa Tengah.

Drop Out dari PKN STAN bukan pertanda kiamat bagi Nensy yang aktif di organisasi perempuan Ikatan Mahasiswa Nahdliyin (IMANISA). Ia justru berhasil bangkit dari keterpurukan berawal dari simpul kekeluargaan yang kuat di IMANISA. Sayap-sayap Nensy semakin kokoh dan yakin dengan ketetapan Allah. Ia berupaya tegar dengan menjalani kisah hidup yang kelak akan menunjukkan jalurnya sendiri.

Kuliah di PKN STAN bagi Nensy sebenarnya bagian dari kisah petualangan hidup. Sebelum menjadi mahasiswi PKN STAN, ia mengenyam Pendidikan selama setahun di Universitas Pendidikan

Indonesia (UPI) Bandung jurusan Bahasa Perancis. Sedangkan di saat bersamaan ia juga diterima di empat kampus berbeda yakni Politeknik Negeri Semarang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, President University, dan STKIP Surabaya. Namun hanya UPI Bandung yang saat itu menyediakan beasiswa hingga lulus.

"Pas tahu DO, tentu saja bapak dan ibu kecewa. Bintang bersinar yang dibanggakannya tiba-tiba jatuh ke tanah," kenang pendiri NGO Indonesian Youth and Culture itu.

Setelah DO, gadis yang aktif dalam Persatuan Pelajar Indonesia Dunia bidang kajian budaya ini pergi ke Semarang untuk berjualan mainan anak-anak. Hal ini ia lakukan untuk menghilangkan trauma dan mengalihkan perhatian atas kondisi bapak/ibu yang terus-terusan bersedih. Di Semarang itulah ia berkenalan dengan banyak ruang baru

termasuk menjadi aktivis Peneleh karena jatuh cinta dengan pergerakan sosok guru bangsa Raja Jawa Tanpa Mahkota H.O.S Tjokroaminoto di bidang kebudayaan, kebangsaan, dan religiusitas.

"Tjokroaminoto membuka wawasan baru tentang titik balik saya untuk lebih struggle dengan berbagai tekanan. Bulan ketiga 2021 di Semarang, saya mulai mendaftarkan diri ke 22 kampus luar negeri. Kenapa hanya kampus luar? Karena universitas dalam negeri belum banyak yang mengakomodir lulusan Madrasah Aliyah non fresh graduate seperti saya," ungkap gadis penikmat karya non fiksi ini.

Putri dari Sugianto dan Sri Juliati itu akhirnya diterima di 10 kampus luar negeri yang tersebar di 4 negara Turki, India, Iran, dan Malaysia. Kampus tersebut diantaranya: Ankara University, Bartin University, Uskudar University, Ibn Khaldun University, Kadir Has University (Turki), Delhy University, Sharda University (India), University of Kurdistan (Iran) dan Al Bukhary International University (Malaysia). Semua universitas tersebut menyediakan beasiswa tetapi Nensy mantap memilih kuliah di Al Bukhary International University Malaysia karena mendapat beasiswa penuh dari Badan Amil Zakat Nasional RI dan kampusnya.

"Bapak saya petani sedangkan ibu buruh pabrik.

Saya ingin membalas kasih sayang mereka dengan kewajiban berjuang mencari beasiswa agar bisa sekolah lagi. Alhamdulillah banyak yang mendukung keputusan saya," tutur Nensy yang kisah cintanya juga pernah pupus di tengah jalan.

Tentang kehidupan asmaranya, mantan anggota Resimen Mahasiswa Batalyon IX itu punya kenangan hambar karena merasa belum tepat waktu dan sosoknya. Ia selalu teringat dawuh gurunya Abah Yai Arifin, 'Fokuslah pendidikan dahulu. Yakinlah bahwa takdir Allah tidak akan pernah salah dan menyakiti hambaNya'.

Ia kemudian mengalihkan kegalauan dengan menyibukkan diri menjadi aktivis sosial. Ikut dalam pengabdian masyarakat ke berbagai penjuru nusantara. Hobi yang sedari kecil ia lakukan, diasah lagi seperti latihan vokal islam dan tradisional, membaca buku, dan menulis riset kecil-kecilan. Semua itu dilakukan untuk menikmati kehidupan hingga perlahan masalahnya teralihkan.

Gadis berzodiak Taurus itu punya minat spesifikasi di bidang *social development*, termasuk nusantara/*cultural ethnic studies*, *social research philosophy*, *women empowerment*, dan *ancient civilizations*. Bahkan bersama Prof. Dr. Mustaffa Omar, Nensy sedang membuat penelitian tentang kenusantaraan di Centre for Policy Research

and International Studies (CenPRIS), University Sains Malaysia. Risetnya itu sedang aktif diamalkan dan dipresentasikan ke berbagai ruang dialektika/konferensi Malaysia-Indonesia.

Fokus penelitian di pengembangan sosial budaya itulah yang membuatnya tergerak berkunjung ke-20 kota/kabupaten di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Bima, Sulawesi selama 30 hari pada tahun 2022 lalu. Ia melakukan perjalanan seorang diri dengan mengunjungi museum, makam tokoh, perpustakaan daerah, dan galeri seni di tiap kota untuk meneliti jejak sejarah peradaban para pejuang/ulama dari berbagai daerah. Sepanjang petualangannya tersebut, ia banyak berjumpa dengan sejarawan, penulis, akademisi, dan koleksi manuskrip kuno. Ia menyebut perjalanannya itu sebagai "Jalan Pulang" karena ia merasa semakin menemukan Allah di setiap sudut kehidupan.

Selepas dari berkeliling Indonesia Timur, ia semakin bertekad menjadi seorang peneliti dan *community developer*. Nensy punya ambisi besar untuk mengembalikan peradaban nusantara sebagai salah-satu pusat peradaban dunia sebagaimana kejayaan zaman kerajaan Sriwijaya/Majapahit dan kesultanan. Ia sangat menyukai motto hidup dari Emha Ainun, 'Asalkan niatnya baik, caranya baik, untuk umat dan senantiasa melibatkan

Allah maka semua pasti akan baik.'

Keberadaan anak-anak muda yang aktif di media sosial menarik perhatian Nensy. Milenial harus berhati-hati dengan mata pisau arus eksistensi diri yang hanya bertujuan untuk *branding image*. Tetapi mereka lupa satu hal tentang tugas peradaban yang serius. Generasi 5.0 jika tidak dimbangi oleh kesadaran kritis, spiritualistik, dan kemanusiaan maka outputnya ialah kosongnya religiusitas. Teknologi punya efek negatif pada deklinasi humanisme dan kehambaan. Sebagai insan muda, tidak boleh menjadi generasi bebek tetapi harus punya kompas keberpihakan terhadap masyarakat.

"Kita punya bonus demografi pengguna internet terbesar di dunia dan ini sebuah keberuntungan. Kita juga menjadi tujuan pangsa pasar perusahaan teknologi global tetapi belum diiringi dengan penguatan jati diri kearifan lokal. Jadinya banyak yang merasa *insecure* terhadap bangsanya sendiri. Tugas membangkitkan peradaban Nusantara inilah yang perlu digaungkan bersama, baik dalam kehidupan maupun keilmuan," pungkas pemilik nama pena dalem siswa yang bisa berkomunikasi dalam 4 bahasa: inggris, turki, perancis, dan arab tersebut.

Reviu Buku : Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi



Celina Faramitha³⁹

"..tak ada senjata yang lebih tajam ketimbang akal, tak ada perisai yang lebih ampuh ketimbang nyali, dan tak ada siasat yang lebih unggul ketimbang hati."

-Banyak Wetan, hlm. 88-

Saya lupa kapan terakhir kali membaca buku dengan kecepatan membalik halaman super kilat. Tentu saja disertai perasaan kerinduan mendalam untuk kembali hanyut di lembaran kata ketika terpaksa harus berhenti sejenak mengerjakan aktivitas lain. Ketika membaca buku ini selama sepekan, saya tidak bisa konsentrasi ingin cepat-cepat pulang ke rumah saat bekerja di kantor. Segera melanjutkan kembali petualangan bersama Sungu Lembu, tokoh utama dari novel "Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi".

Sepanjang membaca, pikiran seperti sedang terbang. Tidak pernah sekalipun mata ini tergiur untuk menengok nomor halaman seperti saat sedang membaca buku dengan ketebalan 450 halaman lainnya. Selama seminggu, buku ini juga yang turut mewarnai malam saya dengan bunga tidur ganjil sesuai latar belakang ceritanya. Rasanya baru kali ini saya mendapatkan pengalaman membaca yang tidak terlupakan. Detail cerita bisa pudar dari ingatan, tapi kesan perasaan bahagia dan antusias dari buku ini tetap melekat pasca 5

tahun saya menuntaskan lembar halaman terakhirnya di tahun 2018.

Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi ditulis oleh Yusi Avianto Pareanom pada 2016. Pakde Yusi bukan penulis yang akan dikenali secara langsung oleh pembaca yang tidak familiar dengan buku-buku keluaran penerbit *indie* Indonesia. Beliau sendiri merupakan lulusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, pernah menjadi wartawan di Majalah Forum Keadilan dan Tempo sebelum akhirnya berkarya sebagai penulis dan penerjemah. Buku ini diluncurkan oleh rumah penerbit independen Banana yang dimilikinya, sehingga mencarinya di toko buku besar akan berujung pada

³⁹Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

kekecewaan. Namun jangan khawatir, *e-commerce* oranye dan hijau mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Kisah dimulai dari pertemuan Sungu Lembu yang merupakan pangeran kerajaan Banjaran Waru dengan Raden Mandasia yang juga pangeran kerajaan Gilingwesi di rumah dadu Nyai Manggis. Sungu Lembu menaruh dendam kesumat pada Kerajaan Gilingwesi karena dulu Banjaran Waru merupakan teritori yang merdeka sebelum akhirnya dikuasai Gilingwesi. Ia melihat bahwa berteman dengan Raden Mandasia yang suka mencuri daging sapi (hanya mau makan bagian has dalam yang langsung dipotong dari ternak hidup yang sedang merumput) akan membuka jalan menuju misinya. Sementara itu, Raden Mandasia juga memiliki tujuan sendiri untuk mencegah perang besar yang datang dengan menuju ke Kerajaan Gerbang Agung. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melakukan petualangan bersama yang asyik, gila, melelahkan, aneh, sekaligus mendebarkan. Sungguh memancing tawa, amarah, sedih, debar, nafsu, penasaran, juga rasa lapar! Ya, lapar karena deksripsi makanan di dalamnya betul-betul membuat mulut berair.

Gaya penuturan tidak perlu dipertanyakan! Perpaduan dongeng, cerita rakyat, sejarah, dari Pinokio sampai Sangkuriang, teramu dengan apik di dalamnya. Hanya orang terpilih yang mampu

memadukan berbagai jenis cerita dengan epik seperti ini. Alur memang berjalan lambat, banyak kilas balik, tapi pembaca dibuat terhipnotis dan mengikuti secara penuh kemanapun penulis membawa pergi kesana kemari alur tanpa bosan. Petualangan melawan lanun di lautan, menyelamatkan pembawa wahyu, bertemu dengan juru masak, singgah di desa penghasil kain celup yang melarang penyebutan warna, berkelana di gurun, mengenakan kulit orang Sida-Sida, menjumpai Putri Tabassum yang tidak pernah bercermin—karena cermin akan langsung pecah berkeping-keping tidak mampu menahan kecantikannya, sampai pada perang besar dengan hujan mayat dari langit, sepenuhnya saya ikuti. Saya pun tak sempat menerka-nerka ke mana arah cerita karena apapun yg disuguhkan Pakde Yusi di dalam buku ini, bisa ditelan dengan nikmatnya.

Novel kerajaan kuno dan perang-perangan jelas bukan selera saya, tapi anehnya, tidak pernah separagrafipun saya merasa bosan. Buku yang aneh, kisah yang tidak pernah saya baca dimanapun. Bahkan, saya tidak menemukan *plot hole* atau kejanggalan dari segi pemilihan waktu. Apresiasi untuk riset yang luar biasa dalam! Semua teknologi dan kondisi cocok dengan zaman di dalam kisahnya, misalnya saja pengukuran yang memakai satuan depa atau tombak—satu depa, sepuluh

tombak-, atau pengukuran jarak menggunakan satuan malam bukan meter seperti masyarakat modern.

Saya benar-benar bingung bagaimana membuat ulasan untuk *masterpiece avant-garde* ini supaya pengalaman menggembirakan dan *book hangover*-nya bisa tergambarkan. Semua bagian novel adalah keindahan yang tidak bisa dipotong-potong. Benar-benar novel terbaik sepanjang usia saya membaca. Saya ingin siapa saja yang saya temui mencoba merasakan luapan emosi dari membaca buku ini. Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi, buku yang sangat luar biasa.



Dampak Sebuah Apresiasi

Indrawan Susanto⁴⁰ & Chintya Pramasanti⁴¹

Sebuah studi yang dilakukan oleh Robert Half International Inc., sebuah konsultan sumber daya manusia global yang berbasis di California, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 66% pegawai meninggalkan pekerjaan mereka karena kurangnya apresiasi di lingkungan kerja mereka. Satu hal lagi yang menarik,

dalam sebuah buku bertajuk *Leading with Gratitude: Eight Leadership Practices for Extraordinary Business Results* yang diterbitkan tahun 2020 terdapat hasil sebuah riset yang menyatakan bahwa ternyata 81% orang yang bekerja mengatakan mereka akan bekerja lebih keras jika atasan mereka menunjukkan rasa terima kasih (apresiasi)

atas pekerjaan mereka.

Dari kedua fakta studi tersebut, ternyata selain meningkatkan produktivitas, pemberian apresiasi di lingkungan kerja juga dapat meningkatkan keterlibatan dan dedikasi pegawai terhadap institusi tempat mereka bekerja. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap loyalitas pegawai.

^{38,39}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Dalam buku tersebut di atas disampaikan pula bahwa apresiasi berupa ungkapan terima kasih adalah bentuk motivasi yang lebih bertahan lama dibandingkan apresiasi berupa benda. Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari.

Memberikan apresiasi merupakan hal yang sederhana dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Apresiasi atau penghargaan tidak hanya soal uang. Memberikannya dapat sesederhana memberikan ucapan positif atau memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berkontribusi lebih dalam sebuah pekerjaan. Lalu bagaimana cara memberi apresiasi yang tepat dan memberikan nilai tambah kepada orang yang kita apresiasi? Banyak cara bisa dilakukan, salah satunya bisa menggunakan RISE *Appreciation Model*. Sebuah model bentuk apresiasi yang banyak digunakan oleh para pakar pengembangan sumber daya manusia. RISE merupakan kependekan dari *Regular, Immediate, Specific, Encouraging*.

Regular. Seringlah memberikan apresiasi kepada orang-orang disekitar kita apalagi yang kesehariannya sering membantu kita menyelesaikan pekerjaan, paling tidak satu sampai dua kali dalam seminggu.

Penelitian menunjukkan bahwa, pemberian apresiasi yang intens dapat menghasilkan keterlibatan orang-orang didalam sebuah tim menjadi lebih kuat. Jadikan apresiasi sebagai prioritas dalam jadwal keseharian kita.

Immediate. Jangan menunda memberikan apresiasi. Saat kita melihat hal positif yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita atau tim kita, segera apresiasi. Sebaiknya jangan menunda, hal tersebut dapat menghilangkan momen dan menurunkan dampak dari apresiasi yang kita berikan. Karena pemberian apresiasi yang *realtime* akan diingat oleh orang yang menerima apresiasi dan hal positif yang telah dilakukan akan berpeluang untuk ditampilkan lagi oleh orang-orang disekitar atau dalam tim kita.

Specific. Pemberian apresiasi yang spesifik akan semakin baik sehingga tidak terkesan sekedar basa-basi. Misalnya, "Terima kasih atas komitmen dan kerja keras yang telah diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan ini pada 31 Desember 2022, sehingga capaian kita melebihi target yang sudah ditentukan."

Encouraging. Secara terbuka, sampaikanlah terima kasih kepada anggota tim dan dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama satu sama lain kepada rekan-rekannya. Kebiasaan

memberikan apresiasi hanya akan dapat tercapai/terbentuk ketika setiap orang terlibat dalam prosesnya. Hal tersebut membantu membangun budaya apresiasi di tiap lini organisasi dimana tempat kita bekerja.

Mari langsung dipraktikkan, siapa orang yang akan kita beri apresiasi hari ini, besok dan seterusnya? Lakukan kepada banyak orang, insya Allah kehidupan dan lingkungan kerja kita akan semakin saling menumbuhkan dan membahagiakan. Yuk buktikan! 😊 [IS/CP]



Sri Mulyani: Secara Keseluruhan, Kinerja APBN 2022 Sangat Baik

Jakarta (03/01/2023)

- Mengawali tahun 2023, Kementerian Keuangan menggelar secara daring konferensi pers "Realisasi APBN 2022" pada 3 Januari 2023 yang disiarkan secara daring. Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan mengenai perkembangan perekonomian tahun 2022 dan realisasi sementara pelaksanaan APBN 2022. Menkeu menyampaikan bahwa secara keseluruhan, kinerja APBN 2022 sangat baik

"Kondisi APBN 2022 mengalami penyehatan yang sangat baik dan relatif cepat," jelas Menkeu.

Kinerja APBN yang baik ini terlihat dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp2.626,4 triliun atau tumbuh 30,6%

dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Komposisi pendapatan negara tersebut mencakup realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun yang terdiri dari realisasi pajak sebesar Rp1.716,8 triliun dan realisasi kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8.

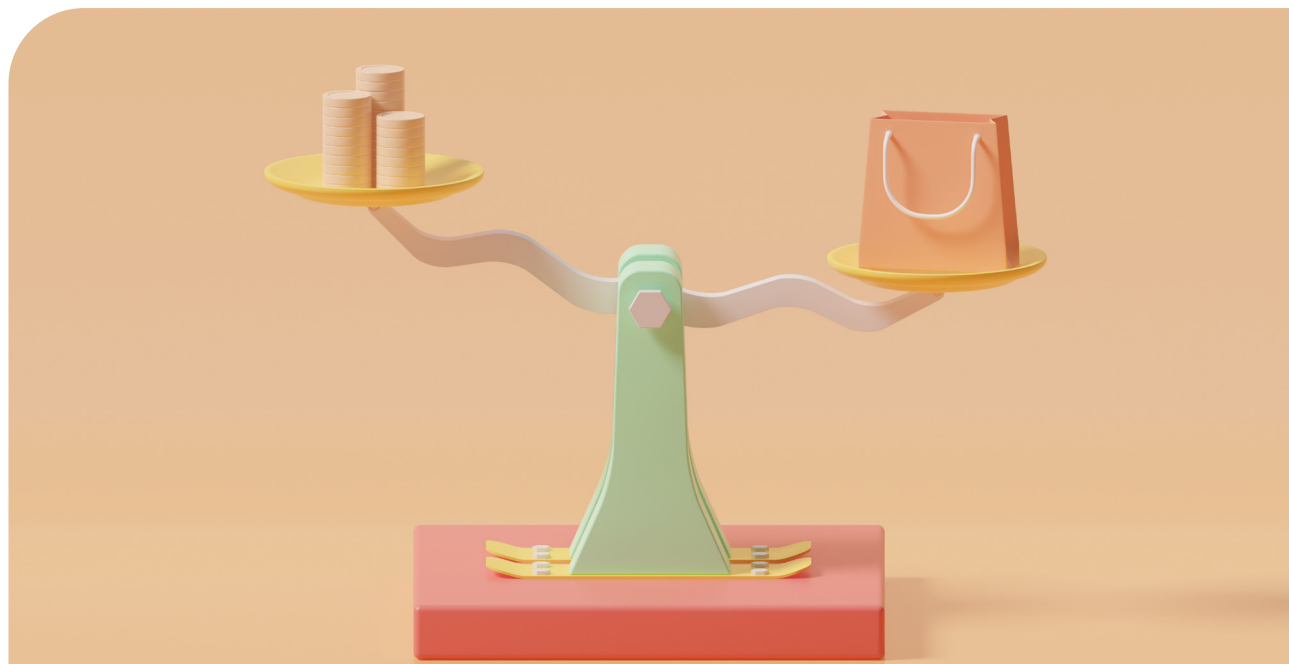
Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp588,3 triliun atau tumbuh sebesar 28,3% dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi PNBP ini didukung oleh meningkatnya harga komoditas (minyak mentah dan minerba), serta membaiknya layanan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

"Jadi kita lihat memang kinerja pajak, bea dan cukai,

dan PNBP sungguh luar biasa," ujar Menkeu.

Dari sisi belanja negara, APBN mencatatkan realisasi belanja negara selama tahun 2022 sebesar Rp3.090,8 triliun atau naik 10,9% dari realisasi tahun 2021. Hal ini sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai *shock absorber*.

"Kita akan terus menjaga APBN keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif, sehat dan *sustainable*. Ini adalah salah satu prasyarat bagi Indonesia untuk terus maju dan berkembang sehingga kita bisa mencapai cita-cita negara Indonesia," tutup Menkeu.



Neraca Perdagangan Surplus, Geliat Pemulihan Ekonomi Semakin Kuat

Jakarta (16/02/2023) - Mengawali tahun 2023, ekspor Indonesia bulan Januari mencatatkan pertumbuhan yang meningkat sebesar 16,37% (yoy) atau mencapai USD22,31 miliar. Pertumbuhan yang cukup baik ini didukung oleh peningkatan ekspor baik komoditas migas maupun nonmigas, yang masih masing-masing meningkat sebesar 65,03% (yoy) dan 13,97% (yoy). Beberapa komoditas utama yang mendukung di antaranya logam mulia dan perhiasan/permata serta karet dan barang dari karet.

Ekspor ke negara mitra dagang utama juga tetap mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Ekspor produk nonmigas ke Tiongkok mencapai 25,2% dari total

ekspor non-migas tumbuh sebesar 49,4% (yoy). Diikuti dengan ekspor nonmigas ke kawasan ASEAN (18,9% dari total ekspor nonmigas) dan India (6,5% dari total ekspor nonmigas) yang masing-masing tumbuh 17,5%, dan 30,5% secara tahunan.

"Walaupun PMI Manufaktur beberapa negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok masih ada dalam zona kontraksi, ekspor masih tumbuh tinggi di awal tahun ini," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Di sisi lain, impor bulan Januari 2023 tercatat sebesar USD18,44 miliar atau tumbuh 1,27% (yoy). Dilihat dari penggunaannya, baik impor barang konsumsi, barang

modal, dan bahan baku penolong masih tumbuh positif, masing-masing sebesar 1,09% (yoy), 5,66% (yoy) dan 0,41% (yoy).

Ke depan, Pemerintah tetap akan mewaspadai potensi tekanan dari perlambatan ekonomi global, sebagaimana tercermin dari masih terkontraksinya PMI Manufaktur negara mitra dagang. Pemerintah akan terus mengupayakan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor, termasuk melalui dorongan hilirisasi sumber daya alam, serta mendorong diversifikasi negara tujuan ekspor, termasuk ke negara-negara potensial.



Kepala BKF: Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Negara-Negara ASEAN Dapat Menciptakan Ekonomi Kawasan yang Tangguh dan Berkelanjutan

Bali (07/03/2023) - Terlepas dari tantangan ekonomi global seperti efek berkelanjutan dari pandemi Covid-19, ketegangan politik di Eropa, serta kerawanan energi, komoditas, dan pangan, ASEAN telah terbukti menjadi kawasan yang stabil dan tangguh. Kawasan ini masih mencatat pertumbuhan di atas 5 persen pada tahun 2022. Forum kerja sama ASEAN hadir sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penguatan ekonomi kawasan, termasuk di bidang perpajakan.

“Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting. Penerimaan pajak mendukung anggaran pemerintah, sementara administrasi pajak yang efisien akan menguntungkan proses bisnis. Selain itu, untuk

mengantisipasi dan menjawab tantangan perpajakan global, khususnya di era digitalisasi ekonomi, kerjasama perpajakan internasional sangat krusial, termasuk di kawasan antar negara anggota ASEAN,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam sambutan pembuka *The 16th Working Group on ASEAN Forum on Taxation and The 13th ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation*.

Febrio berharap negara-negara ASEAN dapat terus memperkuat kerja sama pajak regional di bidang perjanjian pajak berganda, implementasi pertukaran informasi, administrasi pemotongan pajak, dan cukai untuk membantu mobilisasi sumber daya domestik serta memperluas basis pajak bagi negara-negara anggota ASEAN.

Peningkatan kerja sama perpajakan antar negara anggota ASEAN dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain pengurangan biaya administrasi perpajakan dan peningkatan kepastian perpajakan. Dengan berbagi informasi dan praktik terbaik, negara anggota dapat menghindari duplikasi upaya dan merampingkan sistem perpajakan mereka, yang menghasilkan penghematan biaya bagi pembayar pajak dan administrasi pajak.

“Saya yakin tindakan ini akan menjadi bagian dari mendorong investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh untuk kawasan kita,” kata Febrio.



Resilient & Sustainable Economic Recovery: Indonesia G20 Presidency

Anggi Pratiwi⁴²

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Tahun 2022 menjadi salah satu tahun sejarah bagi Indonesia karena menjadi Presidensi G20, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021) lalu. Presidensi G20 Indonesia 2022 memiliki tema “Recover

Together, Recover Stronger”, dimana melalui tema tersebut Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam rangka menyambut perhelatan akbar tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan rangkaian kegiatan seperti *Policy Workshop*, *Focus Group Discussion*, Webinar, Diskusi tertutup, serta kompetisi *Call for Paper* yang bertujuan

untuk menggali lebih jauh ide-ide yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk langkah ke depan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal. *Call for Paper* merupakan salah satu cara Kementerian Keuangan untuk bersosialisasi dengan melibatkan akademisi. Terdapat tiga topik yang ditetapkan dalam *Call for Paper*, yaitu (1) *Digital transformation to promote productivity*, (2) *Improving the quality of human resources after the Covid-19 pandemic*, dan (3) *Sustainable finance*

⁴²Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

to promote inclusive growth. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para pemenang program kegiatan *Call for Paper* yang terdiri dari 19 *paper*, yang terdiri dari 9 *paper* pemenang dari setiap topik yang dikompertisikan dan 10 *paper* pemenang tambahan yang dipilih dari total 75 *paper* yang diajukan para akademisi.

Topik pada bab pertama dalam buku ini ialah "*Digital transformation to promote productivity*", yang memiliki tujuh artikel pemenang dalam topik ini. Bab ini membahas mengenai Indonesia yang telah memasuki era digital selama beberapa tahun terakhir dengan bertumbuhnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam pertumbuhannya, TIK dapat mempengaruhi beberapa aspek, seperti pasar tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi. TIK memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi individu karena merupakan representasi dari kesejahteraan ekonomi yang juga berdampak pada pasar tenaga kerja. Selain itu TIK juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan menggunakan teknologi informasi untuk memajukan perekonomian dengan peningkatan pembangunan infrastruktur digital dan pemerataan akses internet di seluruh wilayah. Dengan adanya pertumbuhan serta pengaruh, TIK juga telah mengubah perdagangan global secara signifikan dan telah menciptakan *Global*

Value Chain (GVC) yang dapat berdampak pada meningkatnya produktivitas dan lapangan kerja industri di Indonesia. Namun dibalik pertumbuhan serta pengaruh penting dari peran TIK, Indonesia masih mengalami kemiskinan digital karena adanya ketimpangan digitalisasi. Perlu adanya pemerataan literasi digital di Indonesia yang dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah, sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur TIK di setiap provinsi. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan layanan TIK dengan memperkuat sinyal dan menstabilkan pasokan listrik di setiap wilayah di Indonesia. Pada tahun 2019, Covid-19 mempengaruhi banyak aspek di setiap negara, khususnya perekonomian dan digitalisasi. Negara dihadapi dengan keharusan untuk bertransformasi ke *digital fintech* atau pembayaran digital. Masyarakat beralih ke konsumsi *online* karena untuk membatasi kontak fisik dan menghindari adanya kerumunan publik, sehingga digitalisasi menjadi kebutuhan ekonomi. Semua anggota negara, khususnya negara G20, mengalami peningkatan dalam kesiapan ekonomi digital selama pandemi.

Topik pada bab kedua dalam buku ini ialah "*Improving Quality of Human Capital Post Covid-19 Pandemic*", yang memiliki tiga artikel terkait topik tersebut. Bab ini membahas mengenai pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun ketahanan perekonomian. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya pasca pandemi Covid-19, ialah dengan membuka kembali sekolah karena akan memulihkan bencana generasi untuk masa depan yang lebih baik. Selama Covid-19 semua sekolah ditutup untuk menghindari adanya kontak secara langsung, hal ini menyebabkan beberapa masalah dengan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan. Dengan dibukanya Kembali sekolah-sekolah, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam system Pendidikan, memberikan kesempatan belajar yang sama bagi pelajar di daerah terpencil. Namun rencana pembukaan kembali sekolah pascapandemi tentunya harus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan *blended learning* untuk tetap menetralkan pandemi di sekolah. selain rencana *blended learning* untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, terdapat pula program Vaksinasi Nasional yang juga dapat mendorong produktivitas SDM dan dapat menciptakan stabilitas perekonomian. Namun pengoptimalisasian program Vaksinasi memiliki ketimpangan akses karena vaksinasi mandiri hanya diterima oleh pekerja perusahaan besar, hal ini menyebabkan minimnya keikutsertaan UMKM dalam program tersebut karena

ada ketimpangan ekonomi antara UMKM dengan korporasi besar. Ketimpangan tersebut dapat diminimalisasi dengan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM. Perusahaan besar akan membantu UMKM yang kesulitan pembiayaan untuk mengikuti program tersebut, selain itu pemerintah juga akan memberikan insentif pajak untuk mendorong kemitraan koperasi besar dan UMKM dengan menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor vaksin dan insentif pajak penghasilan badan melalui skema pengeluaran. Diharapkan insentif pajak dapat meningkatkan tarif vaksinasi, menghemat anggaran pemerintah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat pemulihan perekonomian di Indonesia.

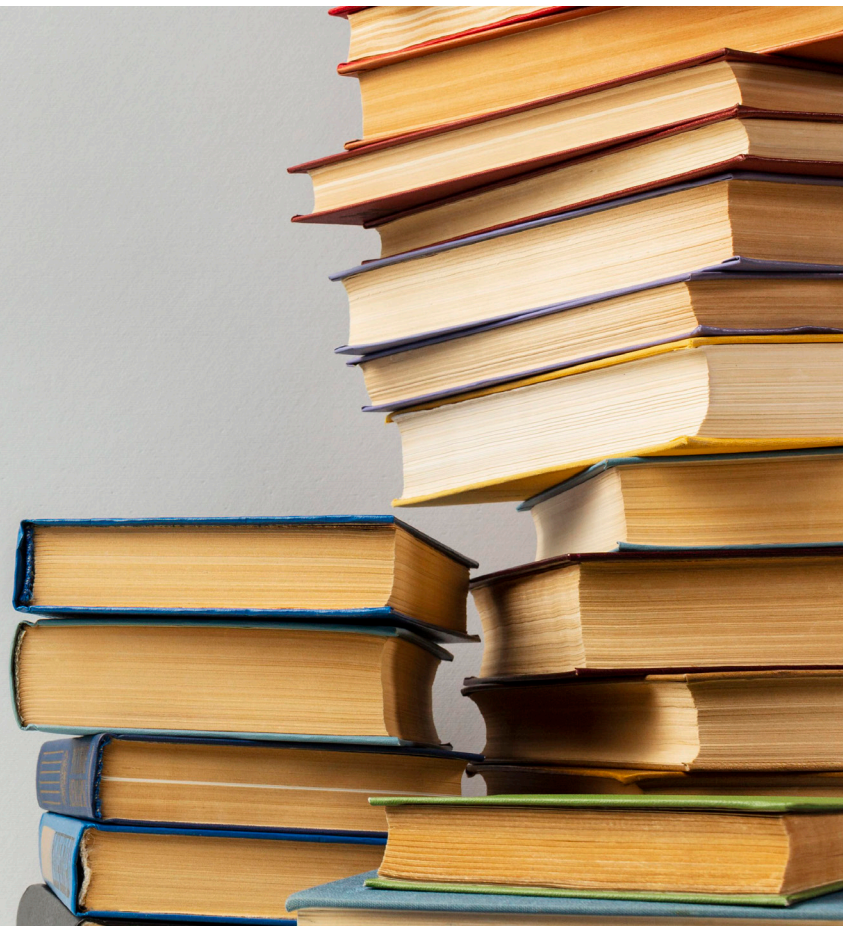
Bab terakhir dalam buku ini, memiliki topik "*Sustainable Finance for Promoting Inclusive Growth*". Terdapat sepuluh artikel dalam topik ini. Pada bab ini membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum inklusif karena rata-rata indeks pertumbuhan inklusif di Indonesia masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan inklusif dapat dicapai melalui inklusi keuangan yang saat ini telah banyak digunakan oleh banyak pemerintah dan bank sentral di negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, inklusi keuangan diterapkan melalui program pemerataan

pendapatan, stabilitas sistem keuangan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dapat didorong dengan adanya akses layanan lembaga keuangan di kalangan pelajar dan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Dalam hal ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mengarahkan perusahaan untuk 'memaksa' karyawannya membuka rekening bank untuk menerima gaji dan upah agar masyarakat mengetahui pentingnya menggunakan Lembaga keuangan, menyalurkan kredit ke sektor selain industri dan sektor industri itu sendiri. Pada kuartal kedua tahun 2020, kinerja sektor keuangan Indonesia terkena dampak terparah akibat pandemi, hal ini merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Sektor perbankan dapat mempromosikan keuangan berkelanjutan dengan melalui industri teknologi keuangan, karena industri tersebut telah meningkatkan inklusi keuangan selama pandemi Covid-19. Teknologi keuangan (*financial technology*) telah mampu menjangkau kelompok yang tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional, selain itu masyarakat lebih memilih *financial technology* (*fintech*) karena kepraktisan dan kemudahan dalam pengoperasiannya dibandingkan dengan jasa keuangan tradisional.

Berbagai macam rencana rumusan kebijakan serta program-program dirancang untuk memulihkan perekonomian Indonesia pascapandemi. Pemerintah pun berupaya untuk terus menggaungkan inklusi keuangan untuk pertumbuhan inklusif demi keuangan berkelanjutan.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca sebagai referensi karena merupakan kumpulan artikel-artikel terpilih dari berbagai kalangan seperti peneliti, profesionalisme, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menawarkan berbagai perspektif untuk memperkaya literasi pembaca terkait isu-isu terkini yang dibahas dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu buku ini juga diharapkan menjadi acuan diskusi sebagai tindak lanjut dalam acara tersebut. Selamat membaca!

Glosarium



PPN Impor

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibebankan untuk Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri.

Restitusi PPN

Pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh PKP ke Pemerintah melalui DJP. Pengembalian ini hanya dapat dilakukan jika jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Rantai pasok

Serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikannya kepada konsumen.

Geopolitik

Bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara.

Kebijakan Hilirisasi

Strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi.

Shock Absorber

APBN dalam menghadapi gejala perubahan ekonomi menjadi instrumen dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global.

Disrupsi

Terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Dalam perkembangannya, perubahan besar yang terjadi di dunia ini kita rasakan dengan mulai munculnya revolusi industri 4.0. Terdapat sembilan pilar yang menjadi ciri perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 antara lain: 1) Analisis *Big Data*, 2) Robot Otonom, 3) Teknologi Simulasi, 4) Integrasi Sistem Horizontal dan Vertikal, 5) Industri Berbasis *Internet of Things* (IoT), 6) Keamanan Siber, 7) Teknologi Informasi berbasis Cloud, 8) Manufaktur Aditif, 9) Teknologi *Augmented Reality*.

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi sehingga dapat mengurangi pemberhentian pekerja.

Pengelolaan utang Pemerintah yang prudent

Dapat diartikan sebagai pengelolaan utang yang memperhatikan koridor atau batasan berdasarkan best practice internasional maupun amanat peraturan perundangan. Koridor tersebut antara lain batasan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60% (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) dan batas maksimum pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) setiap tahun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Quantitative Easing

Kebijakan moneter dari bank sentral untuk meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan membeli aset efek beragun atau *asset backed securities* seperti kartu kredit dan KPR.

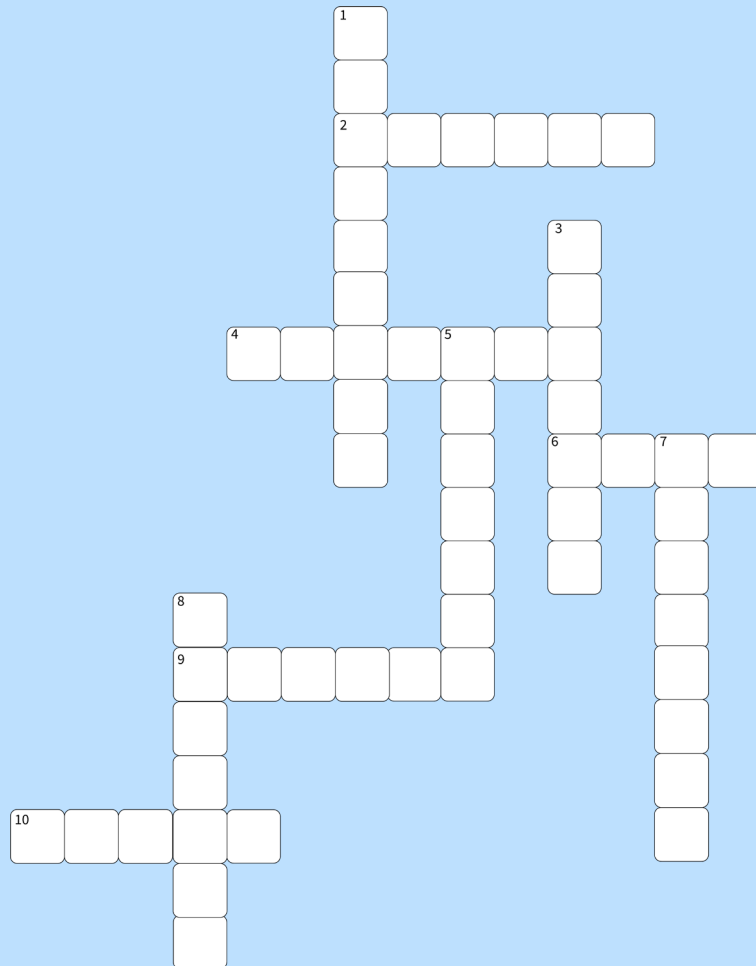
Tapering

Istilah yang mengacu pada penghentian atau pengurangan program tertentu yang dilakukan oleh bank sentral. Sedangkan menurut Akhilesh Ganti, seorang ahli forex, *tapering* merupakan kebijakan yang memiliki dampak berupa penurunan aset di sebuah pasar keuangan. Dalam prosesnya, *tapering* akan dilakukan oleh suatu pemerintah apabila program stimulus yang dijalankan berhasil. Salah satu program yang cukup banyak dilakukan oleh beberapa negara adalah *quantitative easing*.

Kebijakan Countercyclical

Kebijakan anti-siklus bisnis. Artinya, kebijakan akan menjadi ekspansif ketika siklus bisnis sedang dalam penurunan dan kebijakan akan kontraktif saat siklus bisnis sedang naik.

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 2 Menyeluruh
- 4 Pesimis (antonim)
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 9 Mengeluarkan barang dari daerah pabean
- 10 Barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, dikenakan....

Menurun

- 1 Barang dagangan utama
- 3 Hati-hati
- 5 Kebijakan yang ditetapkan bank sentral
- 7 Bantuan biaya belajar
- 8 Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Pemenang Kuis Edisi IV/2022:

1. Wahyuti Manis
2. Lucky Mangapul Simbolon
3. Bapak Karnaji

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id